



Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance*, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Program Studi Akuntansi

Diajukan oleh :

DWI OKTAFIA ARIYANTI

NIM 19.104501

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA JEMBER**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA JEMBER

**"PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN, GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO)"**

Nama : Dwi Oktafia Ariyanti
Nim : 19104501
Program Studi : Akuntansi
Minat Studi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Asisten


Wiwik Fitria Ningsih, S.E.M.Akun.
NIDN.0726068403


Dra. Ratih Rakhmawati, M.P.
NIDN.0712146202

Mengetahui,

Ka. Prodi Akuntansi


Nurshadrina Kartika Sari, S.E.MM
NIDN.0714088901

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA JEMBER

**PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN, GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO)**

Telah dipertahankan Tim Penguji Skripsi Pada :

Hari /Tanggal : Jumat, 28 Juli 2023
Waktu : 08.00 – 09.30
Tempat : Ruang Sidang ITS Mandala Jember

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi :

Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M :
Ketua Penguji

Dra. Ratih Rakhmawati, M.P :
Sekretaris Penguji

Wiwik Fitria Ningsih, S.E.M.Akun :
Anggota Penguji

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Akuntansi ITS Mandala Jember**


Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M
NIDN.0714088901

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
ITS Mandala Jember**


Dr. Muhammad Firdaus, S.E.M.M., M.P
NIDN. 0702106701

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : DWI OKTAFIA ARIYANTI

NIM : 19.104501

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

MINAT STUDI : AKUNTANSI

MATA KULIAH DASAR : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : **Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance*, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo)** merupakan hasil karya ilmiah yang saya buat sendiri.

Apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya siap menanggung resiko dibatalkannya skripsi yang telah saya buat. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Jember, 08 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



DWI OKTAFIA ARIYANTI

MOTTO

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“ Maka jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan
kamu”

(Q.S Fatir: 5)

“ Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala
mereka tanpa batas “

(Q.S Az-Zumar: 10)

“ Jangan menunggu hari esok untuk menggapai mimpi”

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul: **“Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance*, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo)”** sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana S1 Akuntansi Program Studi Akuntansi Institut Teknologi Sains Mandala Jember.

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna dan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, tidak selalu mungkin untuk memisahkan segala sesuatu dari kodrat manusiawi yang memiliki kesalahan dan kekurangan. Banyak pihak yang secara langsung memberikan dukungan materi demi terwujudnya penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Suwignyo Widagdo, S.E.,M.M.,M.P. selaku Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala.
2. Bapak Dr. Muhammad Firdaus, S.E.,M.M.,M.P. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala.
3. Ibu Nurshadrina Kartika Sari,S.E.,M.M, sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Sains Mandala.
4. Ibu Wiwik Fitria Ningsih, S.E.M.Akun sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Dra. Ratih Rakhmawati, M.P, sebagai Dosen Pembimbing Asisten

yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, dorongan, perhatian, serta saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga bisa terlaksana dengan baik.

5. Seluruh dosen Institut Teknologi Sains Mandala Jember yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, pengetahuan, saran, dan kritik kepada penulis.
6. Orang tua penulis Papi Djumadin dan Mami Jumaatun yang telah memberikan dukungan dan doa terbaiknya kepada penulis.
7. Kakakku Sri Wahyuni yang selalu memberikan dukungan dan doa terbaiknya kepada penulis.
8. *Prince Charming* Faizal Makmun, terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
9. Teman-teman angkatan 2019 yang telah mewarnai kisah masa kuliah penulis.

Demikian penulis dapat menyampaikan ilmu kepada pembaca semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulis skripsi ini. Sekian dari penulis, semoga skripsi ini dapat menjadi wacana bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia pendidikan dan kebudayaan. Terima kasih.

Jember, 08 Juli 2023

DWI OKTAFIA ARIYANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAKS	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Batasan Masalah.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
2.2 Kajian Teori.....	21
2.2.1 Implementasi.....	21
2.2.2 Standart Akuntansi Pemerintah	23
2.2.3 Good Governance	26
2.2.4 Akuntabilitas	29
2.2.5 Transparansi.....	31
2.2.6 Laporan Keuangan Daerah	32
2.2.7 Pemerintah Daerah.....	34
2.3 Kerangka Konseptual	36
2.4 Hipotesis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Gambaran Objek Penelitian.....	43
3.2 Populasi dan Sampel	43
3.2.1 Populasi.....	43
3.2.2 Sampel	44
3.3 Jenis Penelitian	45
3.4 Identifikasi Variabel	46
3.4.1. Variabel Bebas (Independent Variabel).....	46
3.4.2. Variabel Terikat (dependen Variabel)	46
3.5 Definisi Operasional Variabel	46
3.5.1 Variabel Bebas	46
3.5.2 Variabel Terikat	48
3.6 Metode Pengambilan Data	48

3.6.1. Studi pustaka dan Dokumentasi.....	49
3.6.2. Kuisisioner.....	49
3.7 Metode Analisis Data	49
3.7.1 Uji Kualitas Data	49
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	51
3.7.3 Analisis Regresi Berganda.....	53
3.7.4 Uji Hipotesis	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Hasil Penelitian.....	55
4.1.1 Sejarah BKAD Kabupaten Situbondo	55
4.1.2 Visi dan Misi BKAD Kabupaten Situbondo	56
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi BKAD Kabupaten Situbondo.....	56
4.1.4 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	57
4.2 Deskripsi Data Penelitian	80
4.3 Analisis Hasil Penelitian	95
4.3.1 Uji Kualitas Data	95
4.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	99
4.3.3 Uji Regresi Linear Berganda	103
4.3.4 Uji Hipotesis	105
4.4 Interpretasi.....	108
BAB V PENUTUP.....	114
5.1 Kesimpulan.....	114
5.2 Implikasi	116
5.3 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1 Tabel Sampel	45
Tabel 3.2 Skor/bobot kuisioner	49
Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian	80
Tabel 4.2 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	81
Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Umur	82
Tabel 4.4 Karakteristik Berdasarkan Masa Kerja	83
Tabel 4.5 Persentase Jawaban SAP (X1)	84
Tabel 4.6 Persentase Jawaban Good Governance (X2)	86
Tabel 4.7 Persentase Jawaban Akuntabilitas (X3)	89
Tabel 4.8 Persentase Jawaban Transparansi (X4)	91
Tabel 4.9 Persentase Jawaban Kualitas lap. keuangan (Y)	93
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas	97
Tabel 4.11 Hasil Uji Reabilitas	98
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas	99
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas	100
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	102
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	103
Tabel 4.16 Hasil Uji t	106
Tabel 4.17 Hasil Uji F	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKAD Kab. Situbondo	57
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Kuisisioner Penelitian.....	122
Lampiran 2 Data Responden dan Tabulasi Data.....	127
Lampiran 3 Hasil Uji Validitas SAP (X1)	128
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas Good Governance (X2)	129
Lampiran 5 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X3)	130
Lampiran 6 Hasil Uji Validitas Transparansi (X4).....	131
Lampiran 7 Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)	132
Lampiran 8 Hasil Uji Reabilitas SAP (X1).....	133
Lampiran 9 Hasil Uji Reabilitas Good Governance (X2).....	134
Lampiran 10 Hasil Uji Reabilitas Akuntabilitas (X3).....	135
Lampiran 11 Hasil Uji Reabilitas Transparansi (X4)	136
Lampiran 12 Hasil Uji Reabilitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)	137
Lampiran 13 Hasil Uji Normalitas	138
Lampiran 14 Hasil Uji Multikolinearitas	138
Lampiran 15 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	139
Lampiran 16 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	140
Lampiran 17 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	140
Lampiran 18 Hasil Uji Simultan (Uji F)	141
Lampiran 19 R_{tabel}	142
Lampiran 20 t_{tabel}	143
Lampiran 21 F_{tabel}	144
Lampiran 22 Dokumentasi	146

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance*, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai kantor Pemerintahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo yang berjumlah 109 pegawai. Sampel yang digunakan berjumlah 60 responden yang merupakan pegawai BKAD yang memenuhi beberapa kriteria. Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif kuantitatif dan metode yang digunakan merupakan metode kuantitatif dimana metode yang datanya menggunakan analisis data yaitu angka (numerik) dengan memakai metode statistik. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu studi pustaka atau dokumentasi dan penyebaran kuisioner dan hasil kuisioner yang diterima kembali akan diolah. Data kuisioner tersebut akan dianalisis dan diolah menggunakan program SPSS versi 25. Pengujian yang digunakan adalah uji data kualitas data (uji validitas dan uji reabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), uji analisis regresi linear berganda, uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, *good governance* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Secara simultan standar akuntansi pemerintah, *good governance*, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Akuntabilitas, dan Transparansi.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of the implementation of Government Accounting Standards, Good Governance, Accountability, and Transparency on the Quality of Regional Financial Statements (Case Study on the Regional Finance and Assets Agency of Situbondo Regency). The population used in this study was employees of the Government office of the Regional Finance and Assets Agency of Situbondo Regency which amounted to 109 employees. The sample used amounted to 60 respondents who were BKAD employees who met several criteria. The type of research used is using quantitative descriptive and the method used is a quantitative method where the method whose data uses data analysis is number (numeric) using statistical methods. The data collection method used is literature study or documentation and distribution of questionnaires and the results of the questionnaires received again will be processed. The questionnaire data will be analyzed and processed using SPSS program version 25. The tests used are data quality data tests (validity tests and reliability tests), classical assumption tests (normality tests, multicollinearity tests, and heteroscedasticity tests), multiple linear regression analysis tests, partial tests (t tests) and simultaneous tests (F tests). The results showed that government accounting standards partially had a significant effect on the quality of regional financial statements, good governance partially did not have a significant effect on the quality of regional financial statements, partial accountability had a significant effect on the quality of regional financial statements, partial transparency had a significant effect on the quality of regional financial statements. Simultaneously, government accounting standards, good governance, accountability and transparency have a significant effect on the quality of regional financial statements.

Keywords: Government Accounting Standards, Good Governance, Accountability, and Transparency.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya Era Reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal yang menitik beratkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah Daerah, dimana daya saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. Dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan payung hukum Pemerintah daerah yang antara lain adalah mengenai pola-pola aplikasi pertanggungjawaban keuangan daerah, yang sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan Negara.

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo adalah salah satu yang berkepentingan dalam menguatkan tata kelola keuangan daerah berbasis pada kinerja laporan keuangan dan pengelolaan aset daerah. Hal ini karena Pemerintah Kabupaten Situbondo menerima APBD yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga diperlukan laporan keuangan yang handal.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Timur atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022, Kamis (25/5). Penghargaan bergengsi tersebut diberikan langsung oleh BPK Perwakilan Jawa Timur kepada Bupati Situbondo, Karna Suswandi di kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo.

Menurut Hidayati (2016) mengemukakan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebagai akibat dari buruknya pengelolaan barang milik daerah, karena ketidak mampuan untuk mencapai tata kelola aset atau barang pemerintah daerah secara baik. Beberapa daerah juga mengalami penurunan Opini dari Wajar Tanpa Pengecualian menjadi Wajar Dengan Pengecualian atau tidak Memberi Pendapat, Ferdianus (2013). Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo mampu mempertahankan pencapaian opini WTP selama 6 tahun berturut-turut sejak tahun anggaran 2016 sampai tahun anggaran 2021 namun masih banyak oknum pemerintahan yang menyalahgunakan anggaran pemerintah seperti isu kepala desa kalisari, korupsi ukl/upl DLH. Meski sudah relatif baik, namun masih dibutuhkan perhatian lebih besar lagi, salah satunya pengelolaan aset daerah dan keuangan daerah.

Pelaporan keuangan daerah Kabupaten Situbondo ini harus dilaporkan sesuai dengan anggaran yang ada dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, jadi apabila salah satu pemerintahan di setiap daerah Kabupaten Situbondo melakukan penggelapan anggaran maka laporan keuangan tersebut dapat

dipertanyakan. Memang Kabupaten Situbondo sudah meraih WTP selama 6 kali berturut-turut tetapi dengan adanya isu tersebut laporan keuangan daerah Kabupaten Situbondo perlu dipertanyakan. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Situbondo dituntut untuk tertib, transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang ada untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan sesuai keinginan masyarakat. Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia sekarang ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun di daerah, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, Stanbury (2003), Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah semakin menguat, berkenaan dengan hal tersebut penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *Good Governance*. *Good Governance* sering diartikan sebagai

pemerintahan yang baik dengan menyelenggarakan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana Investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran.

Undang-Undang No 17 tahun 2003 mengisyaratkan bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah atau laporan keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan BPK di maksud adalah dalam rangka pemberian pendapat (Opini) sebagaimana diamanatkan oleh UU No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami, Keempat kriteria tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus

berkualitas, bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Bahwa informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan keuangan yang disajikan suatu entitas pelaporan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Menurut Juwita (2013) Laporan keuangan yang berkualitas harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara transparansi dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan, agar dapat menjadikan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan keinginan masyarakat banyak.

Menurut Wijaya (2008) Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar akuntansi pemerintah ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. SAP berisikan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di Pemerintah Pusat dan kementerian-kementeriannya maupun di Pemerintah Daerah (Pemda) dan dinas-dinasnya. Menurut Juwita (2013) mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintah sangat berpengaruh dalam pembuatan ataupun pelaporan laporan

keuangan yang berkualitas karena penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Mardiasmo (2009) *Good Governance* merupakan tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintahan daerah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di daerahnya sendiri, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Menurut Azlim (2012) mengemukakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik berpengaruh terhadap pencatatan laporan keuangan daerah, karena semakin baik tata kelola pemerintah daerah tersebut membuat laporan keuangan tersebut baik .

Menurut Komang (2014) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung- jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan . Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). Mahmudi (2010).

Menurut Mardiasmo (2010) Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Berdasarkan pengertian transparansi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh setiap informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil –hasil yang telah dicapai. Transparansi pengelolaan keuangan daerah akan menciptakan hubungan yang erat antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga menciptakan pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Objek penelitian yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu Kantor Pemerintahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo. BKAD Kabupaten Situbondo ini merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dalam membantu tugas bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan dan aset daerah. Peneliti memilih BKAD Kabupaten Situbondo karena banyaknya isu-isu yang tersebar mengenai penggelapan dana maupun pengembalian dana alokasi desa, semua

informasi mengenai keuangan daerah harusnya ditulis dengan baik oleh BKAD Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut dan adanya beberapa saran dari peneliti terdahulu yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa penelitian ini menarik untuk dilakukan pengujian kembali. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fenomena yang terjadi ini untuk menganalisis pengaruh implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance*, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, memiliki pengaruh yang signifikan ataupun tidak berpengaruh. Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah implementasi standar akuntansi pemerintah, *good governance*, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Daerah ?
2. Apakah implementasi standart akuntansi pemerintah, *good governance*, akuntabilitas, dan Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh implementasi standart akuntansi pemerintah, *good governance*, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah secara parsial.
2. Untuk menganalisis pengaruh implementasi standart akuntansi pemerintah, *good governance*, akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini, dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

- a. Bagi pemerintahan daerah penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk lebih menyempurnakan kinerja dalam segi apapun agar lebih baik lagi dalam pencapaian yang lebih memadai.
- b. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan riset untuk mengembangkan penelitian selanjutnya khususnya bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian tentang tema ini.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman bagi penulis khususnya mengenai bagaimana perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang jauh dari penelitian, maka batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Pembahasan penelitian ini hanya dibatasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
2. Pembahasan penelitian ini dibatasi hanya pada pengimplementasian standar akuntansi pemerintahan, *good governance*, akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Penelitian dilakukan pada bulan Januari-Juni 2023.
4. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai badan Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Situbondo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini juga menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dan pertimbangan serta kajian dalam menulis penelitian ini, adapun penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2013) yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan di wilayah Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan metode penelitian yang digunakan yaitu survei eksplanatori. Hasil pengujian regresi secara simultan dengan uji F maupun parsial dengan uji t, memperlihatkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang digunakan oleh Azlim, dkk (2012) yang bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di kota Banda Aceh. Analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan penyebaran data kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan *good governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa

penerapan good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.

Penelitian yang digunakan oleh Nikke, dkk (2018) yang bertujuan untuk menguji secara empiris dampak penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan penyebaran data kuisioner dan sampel yang digunakan sebanyak 82 responden. Hasil penelitian menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan, maka akan berdampak positif pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, seperti tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan cenderung semakin baik.

Penelitian yang digunakan oleh Safridha, dkk (2020) yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian berdasarkan uji t menunjukkan kompetensi sumber daya manusia

yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta hasil penelitian berdasarkan uji F menunjukkan kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan koefisien determinasi 75,5%. Dari pengujian statistik menunjukkan adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian yang digunakan oleh Ikyarti, dkk (2019) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem penegndalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Saluma. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data primer melalui kuisisioner. Hasil penelitian adalah penerapan standar akuntansi pemerintah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Implementasi sistem informasi manajemen daerah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Sistem pengendalian

internal pemerintah daerah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian yang digunakan oleh Karimah (2015) bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan, latar belakang pendidikan, sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan penyebaran data kuisioner dan sampel yang digunakan yaitu metode *purposive sampling*. Hasil analisis berdasarkan penggunaan semua variabel independen menunjukkan bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, latar belakang pendidikan, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fikri, dkk (2016) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan standart akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas inormasi laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan penyebaran data kuisioner dan sampel yang digunakan yaitu metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan penewrapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran internal audit memiliki berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating.

Penelitian yang dilakukan oleh Tutun (2013) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui penyebaran data kuisisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo. Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo sebesar 80.6%.

Penelitian yang dilakukan oleh Widari, dkk (2017) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan penyebaran data kuisisioner dan sampel yang digunakan yaitu metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 2) Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 3) Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Koefisien determinasi menunjukkan pengaruh sistem pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 35%.

Penelitian yang digunakan oleh Wahyuddin, dkk (2017) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan penyebaran data kuisisioner. Dengan hasil a.Hipotesis pertama penelitian ini diterima, yaitu bahwa pemahaman SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. b.Hipotesis kedua penelitian ini diterima, yaitu bahwa pemanfaatan SIA berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. c.Hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima, yaitu bahwa kompetensi SDM memoderasi hubungan antara pengaruh pemahaman SAP terhadap kualitas laporan keuangan. d. Hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima, yaitu bahwa kompetensi SDM memoderasi hubungan antara pengaruh pemanfaatan SIA terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 2.1

Ringkasan Perbedaan dan Persamaan

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Juwita (2013)	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan • Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independent: Standar Akuntansi Pemerintahan • Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan dalam memilih metode penelitian • Perbedaan pada tahun penelitian
2.	Azlim, dkk (2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan <i>Good Governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD • Penerapan <i>good governance</i> berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD • Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode penelitian kuantitatif. • Variabel independent : penerapan <i>good governance</i> dan standart akuntansi pemerintah • Variabel dependen kualitas laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan dalam lokasi atau objek dan dalam melakukan teknik pengambilan data • Perbedaan pada tahun penelitian

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Safridha (2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian berdasarkan uji t menunjukkan kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. • hasil penelitian berdasarkan uji F menunjukkan kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan koefisien determinasi 75,5%. 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah • Variabel dependen: kualitas laporan keuangan daerah • Jenis penelitian yaitu deskriptif kuantitatif • Pengujian paarsial dan simultan 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal • Berbeda dalam memilih lokasi atau objek penelitian • Perbedaan pada tahun penelitian

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6.	Karimah (2015)	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, latar belakang pendidikan, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: standar akuntansi pemerintah Sistem dan Informasi Akuntansi • Variabel dependen: kualitas laporan keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: latar belakang pendidikan, Sistem Pengendalian Internal dan komitmen organisasi • Berbeda dalam memilih lokasi atau objek penelitian • Perbedaan pada tahun penelitian
7.	Fikri, dkk (2016)	<p>Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • penerapan standart akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : standart akuntansi pemerintah • Variabel dependen: kualitas laporan keuangan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : kompetensi aparatur dan peran audit internal • Berbeda dalam memilih lokasi atau objek penelitian • Perbedaan pada tahun penelitian

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
9.	Widari, dkk (2017)	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, • Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, • Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • variabel dependen : kualitas laporan keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • variabel independen : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Komitmen Organisasi
10.	Wahyuddin, dkk (2017)	<p>penelitian ini diterima, yaitu bahwa kompetensi SDM memoderasi hubungan antara pengaruh pemahaman SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan metode <i>moderate regression analysis</i> (MRA) menunjukkan bahwa kompetensi SDM merupakan variabel moderasi dimana kompetensi SDM berhasil memberikan nilai tambah kepada pengaruh pemahaman SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi pemahaman mengenai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen : kualitas laporan keuangan daerah • Jenis penelitian yaitu deskriptif kuantitatif • Pengujian paarsial dan simultan 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Kompetensi Sumber Daya Manusia • Berbeda dalam memilih lokasi atau objek penelitian • Perbedaan pada tahun penelitian

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		pemerintahan dibarengi dengan kompetensi SDM yang baik akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dibandingkan jika hanya memahami standarnya saja.		

Sumber: 2.1 Penelitian Terdahulun Yang Relevan

Pada tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pada variabel independen yaitu pada variabel sumber daya manusia, sistem informasi internal, kompetensi aparatur dan peran audit internal, latar belakang pendidikan, Sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi, terdapat perbedaan pula pada objek penelitian ini dan tahun penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan variabel independen dan dependen. Dimana variabel independennya adalah standart akuntansi pemerintah, *good governance*, akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan daerah.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018) akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik. Pengertian menurut Bastian (2010) akuntansi sektor publik adalah analisis dan teknik akuntansi yang diaplikasikan pada

pengelolaan keuangan di lembaga tinggi negara. Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebadai akuntansi dana masyarakat. Berdasarkan pengertian diatas akuntansi sektor publik merupakan suatu alat penyedia informasi bagi publik terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja.

Jenis-Jenis Organisasi Sektor Publik

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2014), secara garis besar jenis organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga, antara lain :

1. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bebentuk instansi pemerintah.

a. Pemerintah Pusat, termasuk didalamnya :

- 1) Kementrian, seperti departemen dalam negeri, departemen sosial, departemen keuangan, dan lain-lain.
- 2) Lembaga dan badan negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain.

b. Pemerintah daerah, termasuk didalamnya :

- 1) Satuan kerja perangkat daerah seperti inas pendidikan, dinas kesehatan, dinas perhubungan, dinas pendapatandan pengelolaan keuangan dan aset daerah, kantor catatan sipil, dan lain-lain.
- 2) Organisasi nirlaba milik pemerintah

Organisasi Nirlaba Milik pemerintah merupakan bagian dari organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi dimiliki oleh pemerintah. Contohnya :

- a. Peguruan tinggi BHMN
- b. Rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, RS Daerah
- c. Yayasan – yayasan milik pemerintah

3) Organisasi Nirlaba Milik Swasta

2.2.2 Standart Akuntansi Pemerintah

Menurut Mahmudi (2011) standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintah. Dimana dalam lingkup pemerintah dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. SAP sendiri adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Bentuk pengelolaan dan pencatatan keuangan ini mendasari timbulnya standar pelaporan keuangan pemerintah untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti DPR, masyarakat, dan BPK. Tujuannya adalah untuk membuktikan pertanggungjawabannya terhadap rakyat melalui pencatatan transaksi lewat laporan keuangan negara. Transparansi pemerintah sangat dituntut karena berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam mengalokasikan pendapatan dan pengelolaan seluruh sumber daya, baik yang terbatas seperti tenaga kerja dan modal, maupun yang tak terbatas seperti air dan listrik.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan jenis laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD).

1. Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Berikut ini adalah penjelasan tentang tujuan dari akuntansi pemerintahan:

- Tujuan Akuntabilitas. Akuntansi pemerintah dibuat untuk memenuhi berkas laporan pertanggungjawaban keuangan negara yang telah diatur oleh UUD 1945 Pasal 23 ayat 5 di mana negara harus menyajikan laporan pertanggungjawaban dalam setiap pengelolaan finansial.
- Tujuan Manajerial. Akuntansi pemerintahan bertujuan memastikan segala kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan lancar dengan manajemen yang baik.
- Tujuan Pengawasan. Akuntansi pemerintah memudahkan \ pemeriksaan keuangan negara, termasuk ke mana anggaran disalurkan dan berapa uang yang telah dikeluarkan negara.

2. Basis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Basis penerapan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Berbasis Kas

Basis akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam

laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan (PP No.71 tahun 2010).

2. Berbasis Akrual

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, yaitu mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Basis akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi. Atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat uang kas dan setara kas di terima atau di bayar (PP No.71 tahun 2010).

SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010). Karena akuntansi adalah hal penting yang mendasari lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan dalam akuntansi pemerintah, Maka dari itu perlu dipahami bahwa konsep dasar akuntansi yang dimulai dari pencatatan yang baik akan memudahkan pengolahan dan pelaporan bagi keperluan pemerintah.

2.2.3 Good Governance

Menurut Sutedi (2011) *Good Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional). “*Governance* atau tata pemerintahan memiliki tiga domain. yaitu: (1) negara atau pemerintahan, (2) Sektor wisata atau dunia usaha nyata, (3) masyarakat.

Prinsip-Prinsip *Good governance*

Menurut UNDP menguraikan ada 9 prinsip-prinsip *Good governance* yang diurai satu persatu yaitu: (1) partisipasi masyarakat (2) Tegaknya supremasi hukum (3) Transparansi (4) Peduli pada Stakeholder (5) Berorientasi pada Konsensus (6) Kesetaraan (7) Efektivitas dan efisiensi (8) Akuntabilitas (9) Visi Strategis.

1. Partisipasi Masyarakat

Semua masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Setiap orang atau setiap warga negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.

Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama tentang aturan hukum tentang hak asasi manusia. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4. Peduli pada Stakeholder

Pelaksanaan aktivitas pemerintahan selalu mempunyai tujuan ideal yaitu terciptanya suatu sistem pemerintahan yang ideal antara lain ditandai dengan terciptanya hubungan harmonis antara unit-unit pemerintahan yang ada dengan masyarakat serta pemerintah mengayomi secara politik dan hukum kepentingan warga negara dan pemerintah dipercaya oleh publik karena diakui sebagai pemerintah yang bersih dan berwibawa lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat. Pemerintah yang baik (*Good Governance*) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan jika mungkin juga diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka. Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektivitas dan efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholder). Pertanggungjawaban

tersebut berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat eksternal.

9. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek histories, kultur, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

Prinsip-prinsip yang melandasi konsep tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain dari satu pakar ke pakar lainnya Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai landasan *Good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

2.2.4 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah yaitu masyarakat. Dengan demikian penggunaan istilah akuntabilitas publik mengandung makna yang jelas bahwa hasil hasil operasi termasuk di dalamnya keputusan-keputusan dan kebijakan yang diambil/dianut oleh suatu entitas harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada publik (masyarakat) dan masyarakat harus pada posisi untuk dapat mengakses informasi tersebut.

- a. Dari sudut fungsional, J.D Stewart dalam tulisan "*The Role of Information in Public Accountability*" sebagaimana dikutip Trijuwono (1999) menyatakan bahwa akuntabilitas terdiri dari lima tingkatan yang berbeda yaitu: *Policy Accountability*, akuntabilitas atas pilihan kebijakan yang dibuat.
- b. *Program Accountability*, akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektifitas yang dicapai.
- c. *Performance Accountability*, akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien.
- d. *Proses Accountability*, akuntabilitas atas penggunaan proses prosedur atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan tindakan yang ditetapkan.
- e. *Probity and Legality Accountability*, akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian, sesuatu yang dapat dikendalikan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh menejer atau pejabat publik yang berwenang. Sebaliknya, yang tidak kontrolabel adalah tidak akuntabel. Dalam pelaksanaan akuntabilitas, pejabat publik harus mengenal lingkungan baik internal maupun eksternal, artinya dalam situasi bagaimana dioperasikan, karena akuntabilitas itu hanya dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana demokratis, keterbukaan, dan aspirasi masyarakat diakomodasi dengan baik, sehingga di negara otokratis dan tertutup, akuntabilitas tidak akan bisa bersemi. Unsur-unsur Akuntabilitas

menurut Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan (BPKP) 2007 menyebutkan bahwa unsur-unsur dari akuntabilitas ada 4 yaitu jelas, tepat, teratur dan efektif.

2.2.5 Transparansi

Menurut Mahmudi (2016) transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi publik merupakan suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang di keluarkan oleh penyelenggara negara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya.

Menurut Albert (2007) transparansi anggaran didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat dalam fungsi dan struktur pemerintahan, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya. Hal ini berarti bahwa informasi mengenai aktivitas pemerintahan harus dapat di akses serta dapat mengenai aktivitas pemerintahan harus dapat diakses serta dapat dipercaya secara luas dan tepat waktu. Lebih lanjut mengenai Albert, “Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu.” Beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah korupsi
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- c. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu 'mengukur' kinerja pemerintah.
- d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- e. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.
- f. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

2.2.6 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2019) Laporan keuangan merupakan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan suatu entitas pada periode itu atau untuk waktu tertentu. Menurut Bastian (2007) Laporan keuangan daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yang mempresentasikan secara terstruktur posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan. Kualitas laporan keuangan daerah yang disajikan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menampilkan suatu kualitas yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan

pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Menurut Kasmir (2016), secara umum ada lima jenis laporan keuangan biasanya disusun adalah sebagai berikut:

- a. Neraca menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang), modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat tertentu. Akan tetapi, pemilik atau manajemen dapat pula meminta laporan neraca sesuai kebutuhan untuk mengetahui secara persis berapa harta, utang dan modal yang dimilikinya pada saat tertentu.
- b. Laporan laba rugi suatu perusahaan dalam satu periode. Laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha suatu periode tertentu. Artinya, laporan laba rugi harus dibuat dalam satu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah pendapatan biaya yang telah dikeluarkan, sehingga dapat mengetahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.
- c. Laporan perubahan modal Laporan perusahaan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Kemudian, laporan ini juga menunjukkan perusahaan modal serta sebab-sebab perusahaan modal.
- d. Laporan arus kas Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan dan pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.

e. Catatan atas laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada, sehingga menjadi jelas penyebabnya.

Menurut Defitri (2016) Kualitas laporan keuangan yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat dipahami oleh pemakai dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

2.2.7 Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD

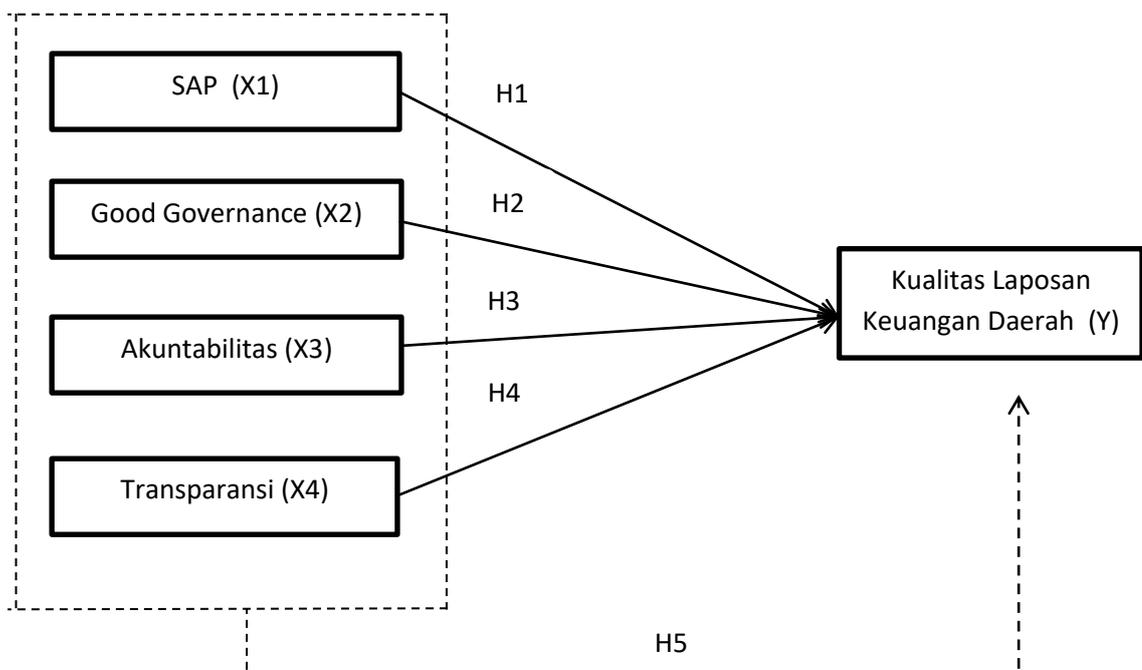
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD

- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

- d. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan Tinjauan Pustaka dan penelitian terdahulu, maka pengaruh dari masing-masing variabel terhadap kualitas laporan keuangan daerah dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

—————> Berpengaruh secara parsial

- - - - -> Berpengaruh secara simultan

Berdasarkan gambar 2.1 menyebutkan bahwa hipotesis yaitu adanya pengaruh secara parsial maupun simultan antara standart akuntansi pemerintah,

sistem informasi akuntansi, *good governance*, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang disajikan dalam bentuk pertanyaan. Dinyatakan sementara karena perumusan yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada bukti empiris yang diperoleh dengan pengumpulan data. hipotesis penelitian tersebut diantaranya:

2.4.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Menurut Bastian (2010) menjelaskan pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut : “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sehingga dengan adanya standar akuntansi pemerintah , maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dalam pembuatan laporan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip standar akuntansi pemerintah dapat menciptakan kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga standar akuntansi pemerintah sangat penting dalam pembuatan dan pencatatan laporan keuangan yang berkualitas.

penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2013) dalam penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.2 Pengaruh Good Governance terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Menurut Mardiasmo (2009) *Good Governance* merupakan tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip yang ada, dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Azlim (2012) menyatakan bahwa Penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : penerapan Good Governance berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2.4.3 Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, mengungkapkan, dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberikan amanah. Akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah digunakan sebagai bukti konsistensi atau tidaknya pemerintah dalam memenuhi standar yang sudah ada dan sebagai kewajiban sekaligus penguatan akuntabilitas sebuah laporan keuangan, laporan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada internal organisasi tetapi juga eksternal organisasi. Dengan adanya akuntabilitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi yang lebih baik untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian sa'adah (2016) pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi anggaran di pemerintahan kabupaten Blitar sudah terwujud. Terwujudnya akuntabilitas dapat dilihat dari upaya pemerintah untuk mempublikasi proses dan dokumentasi pelaksanaan penganggaran Pemerintahan Kabupaten Blitar, namun hasil pertanggungjawaban anggaran kabupaten Blitar. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : penerapan Akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2.4.4 Pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Menurut Mahmudi (2016) transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah akan menciptakan hubungan yang erat antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga menciptakan pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam pelaporan laporan keuangan harus dilaporkan secara transparansi kepada pihak yang berkepentingan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik dan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian sa'adah (2016) pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi anggaran di pemerintahan kabupaten Blitar sudah terwujud. Terwujudnya akuntabilitas yang transparan dapat dilihat dari upaya pemerintah untuk mempublikasi proses dan dokumentasi pelaksanaan penganggaran Pemerintahan Kabupaten Blitar. Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh wibowo (2022) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : penerapan Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2.4.5 Pengaruh penerapan Standar akuntansi pemerintah, good governance, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Menurut Suryanovi (2014) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan pemerintah pusat, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan keuangan pusat. Menurut Mardiasmo (2006) *Good Governance* merupakan tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Menurut Carino (2002) mengatakan bahwa Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar dari tanggungjawab dan kewenangannya. Menurut Krina (2003) Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas harus menerapkan standar akuntansi pemerintah dan harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara transparansi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Ditinjau dari seluruh penelitian terdahulu diperoleh bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance*, Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : diduga SAP, Good Governance, Akuntabilitas, Dan Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran, tujuan, dan kegunaan terhadap sesuatu permasalahan untuk mendapatkan jawaban atau solusi dan kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan. Objek dalam penelitian yang digunakan adalah Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten Situbondo yang beralamat di Jl. Pb. Sudirman No. 1, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. BKAD merupakan Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dalam membantu tugas bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan dan aset daerah.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti (Martono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di kantor pemerintahan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berjumlah 109 responden.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017) sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* dimana sampel dipilih dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang diinginkan. Teknik sampel di tentukan menurut *Roscoe* dalam buku menurut Sugiyono (2011), yaitu apabila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan *multivariate* (korelasi atau regresi ganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Jumlah variabel dalam penelitian ini terdapat 5 variabel (independen dan dependen), maka minimal jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu $10 \times 5 = 50$ responden pada kantor pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu pada BKAD.

Berdasarkan populasi yang diatas kriteria sampel ini yaitu para pegawai yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo yaitu pegawai pada bidang akuntansi, bidang perbendaharaan dan bidang aset . Sampel berjumlah 60 responden .

Tabel 3.1

Berikut jumlah pegawai yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan BKAD Kabupaten Situbondo

No	Nama Bidang	Jumlah Pegawai
1	Bidang Akuntansi	14
2	Bidang Perbendaharaan	20
3	Bidang Aset	26
	Total	60

Sumber: BKAD Kabupaten Situbondo

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif ini menjelaskan peristiwa, situasi dan keadaan di lapangan secara akurat dan sistematis. Sedangkan metode kuantitatif merupakan metode yang datanya menggunakan analisis data yaitu angka (numerik) dengan memakai metode statistika serta memakai pengujian hipotesis sehingga data yang ada merupakan data yang valid.

3.4 Identifikasi Variabel

3.4.1. Variabel Bebas (Independent Variabel)

- Standar Akuntansi Pemerintah (X1)
- *Good Governance* (X2)
- Akuntabilitas (X3)
- Transparansi (X4)

3.4.2. Variabel Terikat (dependen Variabel)

- Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

3.5 Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat Sugiyono (2017). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Indra Bastian (2010) Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan bisa berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Standar akuntansi pemerintah dapat diukur menggunakan indikator SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas.

b. *Good Governance*

Menurut Rukmi (2013) *Good governance* diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat. *Good governance* dapat diukur menggunakan indikator transparansi, penegakan hukum, efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas

Menurut Miriam Budiardjo (2008), akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan kepada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi yang saling mengawasi. Akuntabilitas dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Adanya kejujuran untuk menghindari penyalahgunaan jabatan
2. Adanya pertimbangan alternative program untuk hasil yang optimal dengan biaya yang minimal
3. Adanya laporan pertanggungjawaban

d. Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009) Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah sehingga public dapat dengan mudah mengetahui rencana keuangan pemerintah selama satu tahun kedepan. Transparansi dapat diukur dengan menggunakan indikator informative, pengungkapan dan keterbukaan.

3.5.2 Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Kualitas Laporan Keuangan Daerah merupakan kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Kualitas Laporan Keuangan dapat diukur dengan indikator dalam penelitian ini adalah relevan, andal, dapat dipahami, dan jelas ataupun akurat.

3.6 Metode Pengambilan Data

Metode pengumpulan data adalah cara peneliti dalam memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan sesuai dengan kegunaan dan juga tujuan tertentu dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.6.1. Studi pustaka dan Dokumentasi

Studi pustaka dan dokumentasi merupakan referensi data yang diperoleh dari jurnal dan literature yang berhubungan dengan penelitian ini sebelumnya.

3.6.2. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan sejumlah daftar pertanyaan tertulis yang sebelumnya sudah dirumuskan, yang kemudian responden dapat menjawab. Secara umum kuisisioner disusun guna mengumpulkan banyak data kuantitatif dan bisa diserahkan secara pribadi untuk responden. Keterangan pilihan jawaban dan bobot nilai jawaban dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Skor/bobot penilaian menggunakan skala likert

No	Keterangan	Skor/Bobot
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data adalah uji yang menjadi syarat dalam penelitian yang menggunakan instrument kuisisioner dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2013), uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur (kuisisioner) layak untuk mengukur apakah yang diinginkan. Suatu kuisisioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan nilai *correlated item*, yaitu dengan cara melihat total *correlated item* yang diperoleh dari tiap-tiap pertanyaan. Jika nilai *r* hitung yang diperoleh lebih besar dari *r* tabel dan nilainya positif, maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 25, dengan sampel yang digunakan sebanyak 60 responden pada masing-masing indikator di tiap variabelnya.

2. Uji Reabilitas

Menurut Ghozali (2006), uji reabilitas data merupakan pengujian untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Reabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relative tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subjek yang sama. Suatu kuisisioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan atau pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach alpha* $> 0,60$.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013) uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Regresi yang baik adalah data distribusi normal, untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak tersedia banyak sekali alat bantu dan yang digunakan peneliti adalah teknik Kolmogorov Smirnov. Uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Jika signifikansi dibawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi diatas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan, artinya berarti data yang diuji normal karena tidak berbeda dengan normal baku.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi antara satu variabel bebas dengan variabel lainnya.

Model regresi dapat dikatakan baik apabila terdapat korelasi antara variabel bebas atau variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Apabila nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu uji model regresi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2018). Jika antara penelitian satu dengan penelitian lainnya memperlihatkan variance residual stabil maka dikenal homoskedastisitas, sedangkan jika hasilnya berbeda maka dikenal sebagai heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui terjadinya heteroskedastisitas atau tidak adalah dengan melalui grafik plot pada rentang nilai dengan variabel terikat atau variabel dependen yaitu ZPRED serta residualnya SRESID. Adapun landasan analisis yang digunakan adalah:

- (1) Apabila terdapat bentuk tertentu seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur baik melebar, bergelombang, maupun menyempit maka dapat diidentifikasi bahwa telah terjadi heteroskedastisitas
- 2) Apabila titik-titik tidak menggambarkan pola yang jelas, dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat diidentifikasi bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki keterkaitan positif maupun negative terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah SAP, Good Governance, Akuntabilitas dan transparansi sedangkan variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan daerah. Berikut ini merupakan persamaan regresi berganda yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah

X1 = Standar Akuntansi Pemerintah

X2 = Good Governance

X3 = Akuntabilitas

X4 = Transparansi

α = Konstanta

$\beta_1 X_1 - \beta_4 X_4$ = Koefisien Regresin Variabel X

e = Error atau kesalahan regresi

3.7.4 Uji Hipotesis

1. Uji t atau Parsial

Menurut Ghozali (2013) uji t ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara satu variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Uji statistis t dapat dilakukan dengan membedakan antara skor t-tabel dan t-hitung. Jika nilai *profitability* $> 0,05$ maka hipotesis ditolak dengan artian bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Sedangkan jika nilai *profitability* $t < 0,05$ maka dipotesis diterima atau dapat diartikan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat.

2. Uji F atau Simultan

Uji F ini digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Untuk mengetahui variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen dapat menggunakan tingkat signifikan 0,05, apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa hipotesis ditolak atau variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikan $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima dan dapat diartikan jika variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah BKAD Kabupaten Situbondo

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo terus berbenah diri dengan mengikuti Rapat Koordinasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019 dan penerapan sistem informasi daerah, yaitu penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur yang digunakan pada tahapan perencanaan pembangunan daerah, perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah dan analisis informasi pemerintah daerah lainnya. Banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih oleh pemerintah situbondo seperti meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saat melakukan penyerahan laporan hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Kemudian pada tahun 2022 BPPKAD berganti nama menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Situbondo. BKAD bertugas membantu tugas bupati dalam melaksanakan fungsi penunjangurusan pemerintahan di bidang keuangan.

4.1.2 Visi dan Misi BKAD Kabupaten Situbondo

Visi :

Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri Serta Lebih Beriman, Sejahtera dan Berkeadilan

Misi :

Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi BKAD Kabupaten Situbondo

Tugas :

Membantu Tugas Bupati Dalam Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan

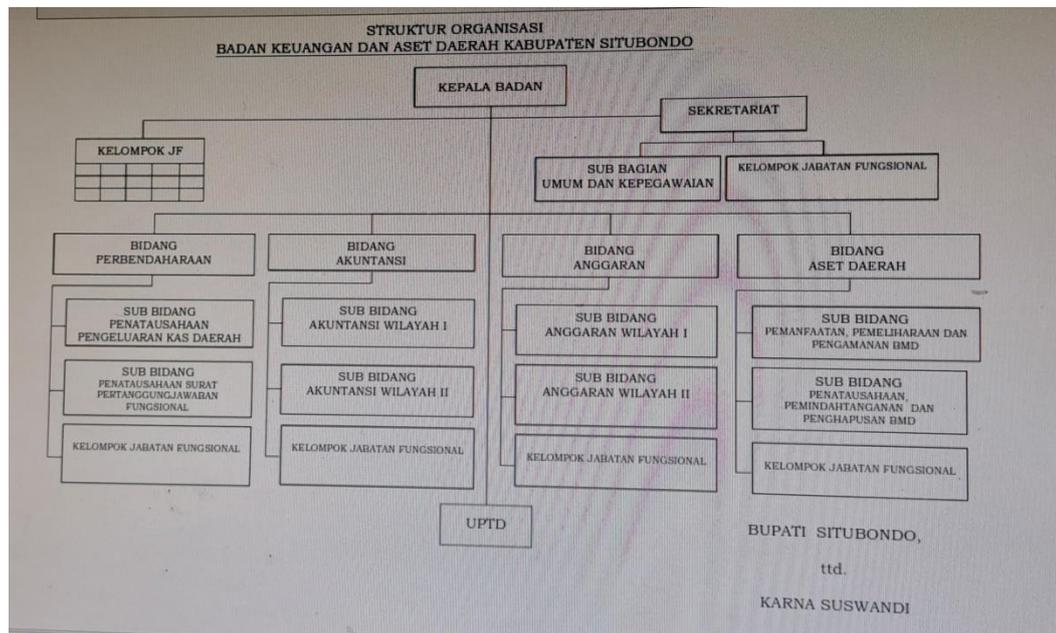
Fungsi :

1. Penyusunan Kebijakan Teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah
2. Penyusunan kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
3. Pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan BMD
4. Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
6. Penyajian Informasi Keuangan Daerah

4.1.4 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi ataupun perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Setiap instansi pemerintahan pasti memiliki struktur organisasi, adanya struktur organisasi di setiap organisasi bertujuan untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari setiap fungsi.; struktur oraganisasi dapat dilihat pada bagan dibawah ini.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Situbondo
Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Situbondo

b. Pembagian Tugas**1) Kepala Badan*****Tugas:***

Membantu Tugas Bupati Dalam Melaksanakan Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan

Fungsi :

1. Penyusunan Kebijakan Teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah
2. Penyusunan kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
3. Pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan BMD
4. Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
6. Penyajian Informasi Keuangan Daerah

2) Sekretariat***Tugas :***

Membantu Kepala Badan dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan.

Fungsi :

1. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga badan, dan administrasi di lingkungan badan;
2. penyusunan rencana kegiatan tahunan badan;
3. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan badan serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
4. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup badan;
5. penyiapan bahan evaluasi tugas–tugas bidang secara terpadu;
6. pelaksanaan urusan keuangan;

a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**Tugas :**

Melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.

Fungsi :

1. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Badan;
2. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Badan dan perbekalan lain;
3. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
4. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
5. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
6. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Badan
7. penyelenggaraan tugas kepegawaian Badan

8. pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan;
9. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
10. penyusunan Laporan Kepegawaian;
11. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkup badan;
12. pelaksanaan ketatausahaan;
13. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberi kan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

Tugas :

Melaksanakan tata usaha keuangan

Fungsi :

1. Pelaksanaan administrasi keuangan Badan yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan serta pembayaran gaji pegawai;
2. Penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
3. Pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Badan;
4. Penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa;
5. Penyusunan laporan kegiatan pengadaan barang dan jasa;
6. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Sub Bagian Penyusunan Program

Tugas :

Melaksanakan perencanaan kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan;
2. Penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Badan;
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Badan;
5. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Badan;
6. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan penunjang bidang keuangan;
7. Penyusunan evaluasi kegiatan Badan;
8. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan;
9. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
10. Penyusunan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
11. Penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan badan;

12. Pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan;
13. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di internal Badan;
14. Penyiapan penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
15. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
16. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Akuntansi

Tugas :

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan sistem dan prosedur, kebijakan, pedoman teknis, dan pembinaan teknis pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah.

Fungsi :

1. pelaksanaan perumusan sistem dan prosedur pelaporan keuangan daerah;
2. penyusunan sistem dan kebijakan akuntansi serta pedoman teknis pelaporan;

3. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. pelaksanaan pembinaan teknis pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah;
5. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
6. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan; dan
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan

a. Sub Bidang Akuntansi Wilayah 1

Tugas :

Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan laporan pertanggungjawab APBD, rekonsiliasi, konsolidasi dan pembinaan teknis laporan keuangan pada Dinas Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
2. Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Dinas Daerah;
3. Pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan pada Dinas Daerah;

4. Pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
5. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan operasional pemerintah daerah
6. Pelaksanaan pembinaan teknis pelaporan keuangan daerah;
7. Pelaksanaan ketatausahaan;
8. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Sub Bidang Akuntansi Wilayah 2

Tugas :

Menyiapkan bahan penyusunan laporan perubahan ekuitas, neraca dan sistem akuntansi, laporan pertanggungjawab APBD, rekonsiliasi, konsolidasi dan pembinaan teknis laporan keuangan pada inspektorat, badan dan satuan polisi pamong praja serta badan usaha milik daerah (BUMD).

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan laporan perubahan ekuitas dan neraca pemerintah daerah;
2. Penyiapan bahan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah;

3. Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada inspektorat, badan dan satuan polisi pamong praja;
4. Pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan pada inspektorat, badan dan satuan polisi pamong praja;
5. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan pada badan umum milik daerah (BUMD);
6. Pelaksanaan pembinaan teknis pelaporan keuangan daerah;
7. Pelaksanaan ketatausahaan;
8. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

c. Sub Bidang Akuntansi Wilayah 3

Tugas :

Menyiapkan bahan penyusunan laporan arus kas dan catatan, petunjuk teknis, laporan pertanggungjawab APBD, rekonsiliasi, konsolidasi dan pembinaan teknis laporan keuangan pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan.

Fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

2. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaporan keuangan daerah;
3. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan;
4. pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan;
5. pelaksanaan pembinaan teknis pelaporan keuangan daerah;
6. pelaksanaan ketatausahaan;
7. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Aset

Tugas :

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, menyelenggarakan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian, penatausahaan dan penghapusan, penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;

2. Pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
3. Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
4. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
6. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bidang Analisa dan Kebutuhan

Tugas :

Menyiapkan bahan rencana dan daftar kebutuhan, analisis standar harga, laporan hasil pengadaan, dan penetapan status penggunaan barang milik daerah.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
2. Penyiapan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD);
3. Penyiapan bahan penyusunan analisis standar harga barang;

4. Penyusunan dan penganalisa Laporan Hasil Pengadaan barang milik daerah dari SKPD yang berupa Laporan hasil pengadaan barang milik daerah secara periodik (bulanan, semesteran dan tahunan);
5. Penyiapan dan penganalisa bahan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
6. Penyiapan rancangan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
7. Penyiapan rancangan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Pelaksanaan ketatausahaan;
9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Sub Bidang Pemanfaatan, pemeliharaan dan Pengamanan BMD

Tugas :

Melaksanakan pendataan, pengamanan, pengawasan, pengendalian, penyimpanan dan penyaluran serta penertiban dan pemanfaatan barang milik daerah.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pendataan keberadaan aset pemerintah daerah;
2. Pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah, secara fisik, administrasi dan secara hukum;

3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap aset pemerintah daerah;
4. Pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah;
5. Penyusunan laporan untuk penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah;
6. Pelaksanaan penertiban, pemanfaatan barang milik daerah
7. Pelaksanaan ketatausahaan;
8. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

c. Sub Bidang Penatausahaan, Pemindahtanganan Dan Penghapusan BMD

Tugas :

Menyiapkan bahan penatausahaan, pembukuan, inventarisasi dan pelaporan serta pemusnahan dan pengelolaan pemindahtanganan barang milik daerah.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penatausahaan barang milik daerah;
2. Pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
3. Pelaksanaan inventarisasi pemanfaatan dan pendayagunaan Barang milik daerah bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah;

4. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/ atau tidak dapat dipindahtangankan dan/atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyiapan bahan pengelolaan Pemindahtanganan barang milik daerah;
6. Pelaksanaan penghimpunan usulan penghapusan dan pemrosesan penghapusan barang milik daerah;
7. Pelaksanaan ketatausahaan;
8. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Perbendaharaan

Tugas :

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembukuan, administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah berupa kas dan setara kas, pengendalian dan mengelola utang dan piutang daerah di bidang perbendaharaan

Fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
2. Pelaksanaan pembukuan, administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah berupa kas dan setara kas;

3. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
4. Pengelolaan utang dan piutang daerah;
5. Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
6. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bidang Penatausahaan Gaji dan Penerimaan Kas Daerah

Tugas :

Melaksanakan penatausahaan gaji dan penerimaan kas daerah.

Fungsi :

1. Pelaksanaan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
2. Pelaksanaan penelitian penerbitan Daftar Gaji PNSD;
3. Pelaksanaan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Pungutan Pihak Ketiga (PFK) Gaji;
4. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen dan menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);

5. Pelaksanaan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan daerah berupa kas dan setara kas;
6. Pelaksanaan pemeriksaan, penganalisaan dan pengevaluasian pertanggungjawaban pendapatan atau penerimaan kas;
7. Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
8. Pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
9. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
10. Pelaksanaan ketatausahaan;
11. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Sub Bidang Penatausahaan Pengeluaran Kas Daerah

Tugas :

Melaksanakan penatausahaan pengeluaran kas daerah.

Fungsi :

1. Penyusunan anggaran kas daerah;
2. Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas;
3. Penyiapan rancangan Surat Keputusan Bupati tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,

Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Ijin Pembukaan/Penggunaan Rekening, Perjanjian Kerjasama dengan pihak perbankan sebagai bank persepsi, Pelimpahan wewenang, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;

4. Pelaksanaan register atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
5. Pelaksanaan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
6. Pelaksanaan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan daftar penguji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
7. Pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas daerah;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap SKPD;
9. Penyusunan dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas;
10. Penyiapan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Milik Daerah;
11. Pelaksanaan ketatausahaan;
12. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan

13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

c. Sub Bidang Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban

Fungsional

Tugas :

Melaksanakan penatausahaan surat pertanggungjawaban fungsional

Fungsi :

1. Pelaksanaan penerimaan, pemeriksaan dan penelitian surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran seluruh SKPD;
2. Pelaksanaan rekap dan pencatatan surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dan membuat bukti rekonsiliasi surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran seluruh SKPD.
3. Pelaksanaan penerbitan surat rekomendasi pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
4. Pelaksanaan pembinaan teknis kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD/PPKD;
5. Penyusunan petunjuk teknis penatausahaan (SPBD)
6. Pelaksanaan ketatausahaan;
7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

6. Bidang Anggaran

Tugas :

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan prosedur, menyusun pedoman dan petunjuk teknis, pengendalian, menyusun raperda APBD/PAPBD, raperbup penjabaran APBD/APBD dan rancangan RKA-PPKD dan DPA-PPKD serta penatausahaan belanja hibah, bantuan, bagi hasil pajak/retribusi, tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.

Fungsi :

1. pelaksanaan perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
2. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
3. pengendalian penyusunan anggaran;
4. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
5. penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD;
6. penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD);
7. pembinaan administrasi keuangan;

8. penatausahaan belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak/retribusi daerah, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan;
9. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
10. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan; dan
11. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

a. Sub Bidang Anggaran Wilayah 1

Tugas :

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, rancangan APBD, verifikasi RKA-SKPD dan DPA-SKPD serta pengesahan DPA-SKPD pada Dinas.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada dinas daerah;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dinas daerah;
- c. Pelaksanaan verifikasi rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD pada dinas daerah;
- d. Penyiapan bahan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD) pada dinas daerah;

- e. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Sub Bidang Anggaran Wilayah 2

Tugas :

Menyiapkan bahan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan, kebijakan, rancangan APBD, verifikasi RKA-SKPD dan DPA-SKPD serta pengesahan DPA-SKPD pada inspektorat, badan, dan satuan polisi pamong praja serta raperda APBD/PAPBD dan raperbup penjabaran APBD/PAPBD.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.
2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran dan rancangan pendapatan dan belanja daerah pada Inspektorat, Badan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Pelaksanaan Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pada Inspektorat, Badan, dan Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Penyiapan Bahan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pada Inspektorat, Badan, dan Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Penyiapan Bahan Penyusunan Anggaran Pembiayaan Daerah ;
6. Penyiapan Bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD ;
7. Penyiapan Bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
8. Pelaksanaan ketatausahaan;
9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

c. Sub Bidang Anggaran Wilayah 3

Tugas :

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, rancangan APBD, verifikasi RKA-SKPD dan DPA-SKPD serta pengesahan DPA-SKPD pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan serta melaksanakan penatausahaan belanja hibah, bantuan, bagi hasil pajak/retribusi, tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan perencanaan anggaran dan rancangan pendapatan dan belanja daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan.
2. Pelaksanaan Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan.
3. Penyiapan bahan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD) pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan.
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
5. Pelaksanaan penatausahaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk uang, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga serta Pengeluaran Pembiayaan;
6. Pelaksanaan ketatausahaan;
7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, kuisisioner yang dibagikan sebanyak 60 lembar eksemplar atau 100% dan kembali dengan jumlah yang sama yaitu 60. Adapun gambaran karakteristik data kuisisioner dan deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuisisioner yang disebar	60	100%
2	Kuisisioner yang kembali	60	100%

Sumber: Data primer yang diolah

4.2.1 Uji Deskriptif

1. Karakteristik Responden

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sumber daya manusia yang berhubungan dengan pembuatan laporan keuangan BKAD Kabupaten Situbondo. Kuisisioner yang dapat diolah pada penelitian ini sebanyak 60. Deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki-laki	44	73%
Perempuan	16	27%
Total	60	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari total 60 responden yang dikelompokkan menjadi 2 terdapat 44 orang (73%) berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang (27%) berjenis kelamin perempuan. Artinya responden tersebut didominasi laki-laki.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sumber daya manusia yang berhubungan dengan pembuatan laporan keuangan BKAD Kabupaten Situbondo. Kuisisioner yang dapat diolah pada penelitian ini sebanyak 60. Deskriptif responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Karakteristik Berdasarkan Jenis Umur

Umur	Jumlah Responden	Persentase (%)
21-25	3	5%
26-30	22	37%
>30	35	58%
Total	60	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dari total 60 responden yang dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan umur responden terdapat 3 orang (5%) yang berumur 21-25 tahun, 22 orang (37%) yang berumur 26-30 tahun, dan 35 orang (58%) yang berumur lebih dari 30 tahun. Artinya didominasi oleh responden yang berumur lebih dari 35 tahun

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sumber daya manusia yang berhubungan dengan pembuatan laporan keuangan BKAD Kabupaten Situbondo. Kuisisioner yang dapat diolah pada penelitian ini sebanyak 60. Deskriptif responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Karakteristik Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah Responden	Persentase (%)
< 2 tahun	9	15%
3-5 tahun	15	25%
> 5 tahun	36	60%
Total	60	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari total 60 responden yang dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan masa kerja terdapat sebanyak 9 orang (15%) telah bekerja selama kurang dari 2 tahun, 15 orang (25%) telah bekerja selama 3-5 tahun, dan 36 orang (60%) telah bekerja selama lebih dari 5 tahun. Artinya didominasi oleh responden yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun.

2. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel dalam penelitian ini menjelaskan mengenai distribusi frekuensi jawaban responden dari indikator yang terdapat pada pernyataan kuisisioner penelitian, yakni Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), *Good Governance* (X2), Akuntabilitas (X3), Transparansi (X4) dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Penelitian ini menggunakan skala likert dengan memberi skor 1-5 dengan jawaban dari mulai STS=Sangat Tidak Setuju dengan skor 1,

TS=Tidak Setuju dengan skor 2, N=Netral dengan skor 3, S=Setuju dengan skor 4, SS=Sangat Setuju dengan skor 5 untuk jawaban responden. Dari data distribusi frekuensi dapat diketahui berapa nilai suatu variabel jika dibandingkan dengan nilai variabel lainnya dan bagaimana keterkaitan atau hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian. Jawaban responden tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Deskripsi Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan BKAD Kabupaten Situbondo. Kuisioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 60. Dalam mendeskripsikan variabel Standar Akuntansi Pemerintahan, maka dilihat pada frekuensi hasil tanggapan responden terhadap masing-masing pertanyaan atau indikator yang digunakan untuk mengukur variabel standar akuntansi pemerintah.

Tabel 4.5

Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Berkaitan dengan Pembuatan Laporan Keuangan BKAD Kabupaten Situbondo

item pertanyaan	Skor Jawaban Responden										Total	
	SS		S		N		TS		STS		F	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	41	68,3%	19	31,7%	0	0%	0	0%	0	0%	60	100,0%
2	42	70,0%	18	30,0%	0	0%	0	0%	0	0%	60	100,0%
3	36	60,0%	18	30,0%	3	5%	3	5%	0	0%	60	100,0%

Sumber: Data Primer yang Diolah, Juni 2023

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan tanggapan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pernyataan 1, menunjukkan tanggapan mengenai penyusunan laporan keuangan daerah sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dari total 60 responden terdapat 19 responden menjawab setuju dan 41 responden menjawab sangat setuju. Dapat dipersentasekan dari total jawaban responden mayoritas menyatakan setuju 31.7% dan sangat setuju 68,3%. Artinya responden sudah menerapkan standar akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas dan juga prinsip standar akuntansi pemerintah ini harus dilaksanakan dengan baik di setiap daerah.
- 2) Pernyataan 2, menunjukkan tanggapan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah telah menerapkan basis akrual untuk mengakui aset, dari total 60 responden terdapat 18 responden menjawab setuju dan 42 responden menjawab sangat setuju. Dapat dipersentasekan dari total jawaban responden mayoritas menyatakan setuju 30,0% dan sangat setuju 70,0%. Artinya dalam pembuatan laporan keuangan untuk mengakui aset pemerintah daerah telah menerapkan standar akuntansi pemerintah brbasis akrual.
- 3) Pernyataan 3, menunjukkan tanggapan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah telah menerapkan basis kas untuk mengakui pendapatan, dari total 60 responden terdapat 3 responden menjawab tidak setuju, 3 responden menjawab netral, 18 responden menjawab setuju dan 36 responden menjawab sangat setuju. Dapat dipersentasekan dari total jawaban responden mayoritas menyatakan

tidak setuju 1,6%, netral 3,3%, setuju 33,3% dan sangat setuju 61,6 %.

Artinya dalam pembuatan laporan keuangan untuk mengakui pendapatan pemerintah daerah telah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis kas.

b. Deskripsi Variabel *Good Governance* (X2)

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan BKAD Kabupaten Situbondo. Kuisioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 60. Dalam mendeskripsikan variabel *Good Governance*, maka dilihat pada frekuensi hasil tanggapan responden terhadap masing-masing pertanyaan atau indikator yang digunakan untuk mengukur variabel *good governance*.

Tabel 4.6

Persentase Jawaban Responden Berdasarkan *Good Governance* yang Berkaitan dengan Pembuatan Laporan Keuangan BKAD Kabupaten Situbondo

item pertanyaan	Skor Jawaban Responden										Total	
	SS		S		N		TS		STS		F	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	36	60,0%	19	31,7%	4	6,7%	1	1,6%	0	0%	60	100%
2	37	61,7%	22	36,7%	1	1,6%	0	0%	0	0%	60	100%
3	31	51,7%	28	46,7%	1	1,6%	0	0%	0	0%	60	100%
4	27	45,0%	25	41,7%	8	13,3%	0	0%	0	0%	60	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, Juni 2023

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan tanggapan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pernyataan 1, menunjukkan tanggapan mengenai penerapan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik sudah diselenggarakan dengan transparansi, dari total 60 responden terdapat 1 responden menjawab tidak setuju, 4 responden menjawab netral, 19 responden menjawab setuju dan 36 responden menjawab sangat setuju. Dapat dipersentasekan dari total jawaban responden mayoritas menyatakan setuju 31,7% dan sangat setuju 60,0%. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah dalam pengelolaan ataupun tata kelola pemerintahan sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan yang masyarakat inginkan.
- 2) Pernyataan 2, menunjukkan tanggapan mengenai pertanggungjawaban instansi sudah dilaksanakan secara periodik melalui laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP), dari total 60 responden terdapat 1 responden menjawab netral, 22 responden menjawab setuju dan 37 responden menjawab sangat setuju. Dapat dipersentasekan dari total jawaban responden mayoritas menyatakan setuju 36,7% dan sangat setuju 61,7%. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan pelaporan ataupun akuntabilitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 3) Pernyataan 3, menunjukkan tanggapan mengenai menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan secara efektif, dari total 60 responden terdapat 1

responden menjawab netral, 28 responden menjawab setuju dan 31 responden menjawab sangat setuju. Dapat dipersentasekan dari total jawaban responden mayoritas menyatakan setuju 46,7% dan sangat setuju 51,7%. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan sumber daya publik secara efektif agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat banya.

- 4) Pernyataan 4, menunjukkan tanggapan mengenai pemeliharaan fasilitas publik sudah dikelola secara efektif dan efisien, dari total 60 responden terdapat 8 responden menjawab netral, 25 responden menjawab setuju dan 27 responden menjawab sangat setuju. Dapat dipersentasekan dari total jawaban responden mayoritas menyatakan setuju 41,7% dan sangat setuju 45,0%. Hal ini dapat diartikan bahwa agar terciptanya tata kelola yang baik pemerintah daerah harus melakukan pemeliharaan fasilitas publik dengan baik secara efektif dan efisien agar fasilitas publik tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

c. Deskripsi Variabel Akuntabilitas (X3)

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan BKAD Kabupaten Situbondo. Kuisisioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 60. Dalam mendeskripsikan variabel Akuntabilitas, maka dilihat pada frekuensi hasil tanggapan responden terhadap masing-masing pertanyaan atau indikator yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas.

Tabel 4.7

Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Akuntabilitas yang Berkaitan dengan Pembuatan Laporan Keuangan BKAD Kabupaten Situbondo

item pertanyaan	Skor Jawaban Responden										Total	
	SS		S		N		TS		STS		F	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	19	31,6%	34	56,6%	4	6,7%	3	5,0%	0	0%	60	100%
2	19	31,6%	37	61,6%	4	6,7%	0	0,0%	0	0%	60	100%
3	17	28,3%	32	53,3%	10	16,7%	1	1,6%	0	0%	60	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, Juni 2023

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan tanggapan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pernyataan 1, menunjukkan tanggapan mengenai penerapan akuntabilitas dalam hal pengawas, pengurus, dan karyawan telah mengetahui visi, misi, dan tujuan operasional, dari total 60 responden terdapat 3 responden menjawab tidak setuju, 4 responden menjawab netral, 34 responden menjawab setuju dan 19 responden menjawab sangat setuju. Dapat dipersentasekan dari total jawaban responden mayoritas menyatakan setuju 56,6% dan sangat setuju 31,6%. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pelaporan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih.
- 2) Pernyataan 2, menunjukkan tanggapan mengenai penerapan akuntabilitas dalam hal pelaksanaan program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku, dari total 60 responden terdapat, 4 responden menjawab netral, 37 responden

menjawab setuju dan 19 responden menjawab sangat setuju. Dapat dipersentasekan dari total jawaban responden mayoritas menyatakan setuju 61,6% dan sangat setuju 31,6%. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan akuntabilitas terhadap masyarakat luas sehingga masyarakat sendiri sudah merasakan manfaatnya.

- 3) Pernyataan 3, menunjukkan tanggapan mengenai penerapan akuntabilitas dalam hal pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat, dari total 60 responden terdapat 1 responden menjawab tidak setuju, 10 responden menjawab netral, 32 responden menjawab setuju dan 17 responden menjawab sangat setuju. Dapat dipersentasekan dari total jawaban responden mayoritas menyatakan setuju 53,3% dan sangat setuju 28,3%. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang berkepentingan seperti DPRD dan juga masyarakat.

d. Deskripsi Variabel Transparansi (X4)

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan BKAD Kabupaten Situbondo. Kuisisioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 60. Dalam mendeskripsikan variabel Transparansi, maka dilihat pada frekuensi hasil tanggapan responden terhadap masing-masing pertanyaan atau indikator yang digunakan untuk mengukur variabel transparansi.

Tabel 4.8

Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Akuntabilitas yang Berkaitan dengan
Pembuatan Laporan Keuangan BKAD Kabupaten Situbondo

item pertanyaan	Skor Jawaban Responden										Total	
	SS		S		N		TS		STS		F	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	15	25,0%	26	43,3%	18	30,0%	1	1,6%	0	0%	60	100%
2	19	31,7%	21	35,0%	15	25,0%	5	8,3%	0	0%	60	100%
3	20	33,3%	29	48,3%	10	16,7%	1	1,6%	0	0%	60	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, Juni 2023

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan tanggapan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pernyataan 1, menunjukkan tanggapan mengenai penerapan transparansi dalam hal masyarakat mudah dalam mengakses dan mendapatkan informasi laporan keuangan di pemerintah daerah, dari total 60 responden terdapat 1 responden menjawab tidak setuju, 18 responden menjawab netral, 26 responden menjawab setuju dan 15 responden menjawab sangat setuju. Dapat dipersentasekan dari total jawaban responden mayoritas menyatakan setuju 43,3% dan sangat setuju 25,0%. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah sudah terbuka dan transparan kepada masyarakat tentang laporan keuangannya sehingga masyarakat mudah dalam mengakses dan mendapatkan informasi.
- 2) Pernyataan 2, menunjukkan tanggapan mengenai penerapan transparansi dalam hal laporan keuangan dan laporan hasil audit BPK

dipublikasikan di website resmi pemerintah daerah, dari total 60 responden terdapat 5 responden menjawab tidak setuju, 15 responden menjawab netral, 21 responden menjawab setuju dan 19 responden menjawab sangat setuju. Dapat dipersentasekan dari total jawaban responden mayoritas menyatakan setuju 35,0% dan sangat setuju 31,7%. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pelaporan laporan keuangan beserta informasi lainnya mengenai keuangan sudah tersedia dalam website resmi pemerintah daerah untuk dijangkau oleh masyarakat.

- 3) Pernyataan 3, menunjukkan tanggapan mengenai penerapan transparansi dalam hal pengawas, pengurus, dan karyawan terbuka dalam proses pengambilan keputusan, dari total 60 responden terdapat 1 responden menjawab tidak setuju, 10 responden menjawab netral, 29 responden menjawab setuju dan 20 responden menjawab sangat setuju. Dapat dipersentasekan dari total jawaban responden mayoritas menyatakan setuju 48,3% dan sangat setuju 33,3%. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pengambilan keputusan ataupun rencana maupun program kerja yang akan dilakukan sudah dilakukan secara transparan kepada pihak yang berkepentingan.

e. Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan BKAD Kabupaten Situbondo. Kuisisioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 60. Dalam mendeskripsikan variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah, maka dilihat pada frekuensi hasil tanggapan responden terhadap masing-masing pertanyaan atau indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan daerah.

Tabel 4.9

Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah BKAD Kabupaten Situbondo

item pertanyaan	Skor Jawaban Responden										Total	
	SS		S		N		TS		STS		F	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	25	41,7%	33	55,0%	2	3,3%	0	0%	0	0%	60	100%
2	25	41,7%	32	53,3%	2	3,3%	1	1,6%	0	0%	60	100%
3	27	45,0%	27	45,0%	5	8,3%	1	1,6%	0	0%	60	100%
4	25	41,7%	32	53,3%	3	5,0%	0	0%	0	0%	60	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, Juni 2023

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan tanggapan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pernyataan 1, menunjukkan tanggapan mengenai laporan keuangan pada instansi telah menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan di masalah dan mampu memprediksi masa yang akan datang , dari total 60 responden terdapat, 2 responden menjawab netral, 33 responden menjawab setuju dan 25 responden menjawab sangat setuju. Dapat dipersentasekan dari total jawaban

responden mayoritas menyatakan setuju 48,3% dan sangat setuju 41,7%. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah dalam melakukan pembuatan laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip yang ada sehingga laporan keuangan tersebut bagus.

- 2) Pernyataan 2, menunjukkan tanggapan mengenai laporan keuangan pada instansi telah menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, dari total 60 responden terdapat 1 responden menjawab tidak setuju, 2 responden menjawab netral, 32 responden menjawab setuju dan 25 responden menjawab sangat setuju. Dapat dipersentasekan dari total jawaban responden mayoritas menyatakan setuju 53,3% dan sangat setuju 41,7%. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah dalam pembuatan laporan keuangan sudah dilakukan dengan baik sehingga informasi yang dihasilkan lengkap dan jelas.
- 3) Pernyataan 3, menunjukkan tanggapan mengenai informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan pada instansi telah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna, dari total 60 responden terdapat 1 responden menjawab tidak setuju, 5 responden menjawab netral, 27 responden menjawab setuju dan 27 responden menjawab sangat setuju. Dapat dipersentasekan dari total jawaban responden mayoritas menyatakan setuju 45,0% dan sangat setuju 45,0%. Hal ini dapat diartikan bahwa

laporan keuangan pemerintah daerah sudah dilakukan dengan baik dan jelas sehingga dapat dihindarkan dari ketidakjelasan pelaporan.

- 4) Pernyataan 4, menunjukkan tanggapan mengenai laporan keuangan pada instansi telah disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami dengan jelas, dari total 60 responden terdapat 3 responden menjawab netral, 32 responden menjawab setuju dan 25 responden menjawab sangat setuju. Dapat dipersentasekan dari total jawaban responden mayoritas menyatakan setuju 53,3% dan sangat setuju 41,7%. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah dalam pembuatan dan pelaporan laporan keuangannya sudah disusun terlebih dahulu secara sistematis agar dapat dipahami dengan mudah.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

4.3.1 Hasil Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas

Angket yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data. Suatu kuisisioner dikatakan valid apabila pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuisisioner dan sejauh mana suatu alat ukur tersebut benar-benar sesuai sebagai sebagai alat ukur yang digunakan menurut Ghozali (2013). Untuk pengujian pengujian validitas angket dilakukan dengan membandingkan r_{tabel} (pearson correlation) dengan r_{hitung} . Nilai r_{tabel} dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$.

Penelitian ini dalam pengujian validitas peneliti menggunakan alat ukur berupa program computer yaitu SPSS 25 (*Statistical Package For The Social Science*). Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pada penelitian ini jumlah sampel (n) = 60 dan besarnya df dapat dihitung $60-2 = 58$, dengan df dan alpha = 0,05 di dapat r tabel 0,254, sehingga syarat minimum untuk dianggap valid adalah nilai r hitung $\geq 0,254$. Untuk menguji apakah masing-masing indikator valid atau tidak, bisa dilihat dari tampilan output Combach Alpha pada kolom Correlated item - total correlation bandingkan dengan hasil perhitungan r tabel = 0,254 menurut Ghozali (2013). Tingkat kevalidan indikator atau koefisien dapat ditentukan, apabila r hitung $>$ r tabel = Valid, dan r hitung $<$ r tabel = Tidak Valid. Hasil validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas

Variabel Indikator	r tabel 0,05 (60)	r hitung	Signifikansi	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah (X)				
X1.1	0,254	0,843	0,000	Valid
X1.2	0,254	0,743	0,000	Valid
X1.3	0,254	0,824	0,000	Valid
Good Governance (X2)				
X2.1	0,254	0,779	0,000	Valid
X2.2	0,254	0,743	0,000	Valid
X2.3	0,254	0,548	0,000	Valid
X2.4	0,254	0,833	0,000	Valid
Akuntabilitas (X3)				
X3.1	0,254	0,792	0,000	Valid
X3.2	0,254	0,817	0,000	Valid
X3.3	0,254	0,830	0,000	Valid
Transparansi (X4)				
X4.1	0,254	0,850	0,000	Valid
X4.2	0,254	0,877	0,000	Valid
X4.3	0,254	0,725	0,000	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)				
Y.1	0,254	0,762	0,000	Valid
Y.2	0,254	0,884	0,000	Valid
Y.3	0,254	0,868	0,000	Valid
Y.4	0,254	0,845	0,000	Valid

Pada tabel 4.10 hasil uji validitas diatas memperlihatkan bahwa nilai r_{hitung} setiap indikator variabel standar akuntansi pemerintah *good governance*, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas laporan keuangan lebih besar dibanding nilai r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Dengan demikian indikator atau kuisisioner yang digunakan oleh masing-masing variabel standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas laporan keuangan dapat dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

2. Hasil Uji Reabilitas

Uji reabilitas data merupakan pengujian untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Reabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relative tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subjek yang sama menurut Ghazali (2006). Hasil korelasi data pada uji reabilitas dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11

Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Reabilitas	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	0,60	0,710	Reabilitas diterima
<i>Good Governance</i> (X2)	0,60	0,707	Reabilitas diterima
Akuntabilitas (X3)	0,60	0,732	Reabilitas diterima
Transparansi (X4)	0,60	0,753	Reabilitas diterima
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,60	0,860	Reabilitas diterima

Sumber: Data Primer yang Diolah, Juni 2023

Pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa data hasil pengolahan SPSS semua variabel dari uji reabilitas menunjukkan jumlah nilai lebih dari 0,60 maka dapat dikatakan reliabel atau konsisten. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ghazali (2006), apabila nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ maka kuisisioner atau angket dapat dinyatakan reliabel atau konsisten.

4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas, variabel terikat, atau berdistribusi normal atau tidaknya dengan menggunakan uji normalitas. Berikut adalah hasil dari uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini:

Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,53100075
Most Extreme Differences	Absolute	,075
	Positive	,075
	Negative	-,048
Test Statistic		,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data Primer yang Diolah, Juni 2023

Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa hasil uji K-S ditemukan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$, jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikoleniaritas

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independent. Adapun hasil uji multikoleniaritas tersaji dalam tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13
Uji Multikoleniaritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,098	2,505		2,036	,047		
	SAP	,453	,198	,277	2,287	,026	,668	1,497
	GOOD GOVERNANCE	-,238	,148	-,207	-1,605	,114	,590	1,696
	AKUNTABILITAS	,498	,159	,397	3,133	,003	,611	1,637
	TRANSPARANSI	,339	,122	,333	2,771	,008	,679	1,473

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

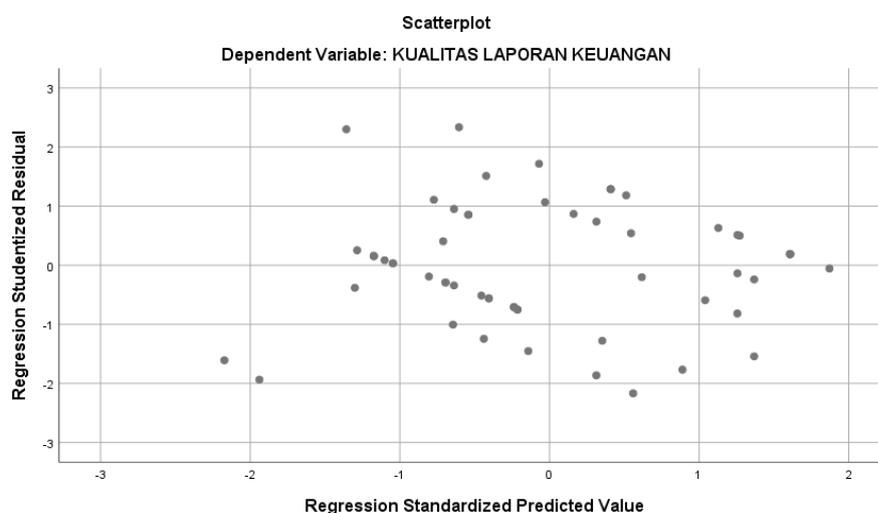
Sumber: Data Primer yang Diolah, Juni 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Sedangkan menurut (Ghozali, 2013) nilai *cutoff* yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikoleniaritas adalah nilai tolerance kurang dari 10 atau sama dengan nilai VIF lebih dari 0,10 maka pada data semua variabel tidak terjadi multikoleniaritas.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu uji model regresi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya menurut Ghozali (2018). Salah satu cara untuk mengetahui terjadinya heteroskedastisitas atau tidak adalah dengan melalui grafik plot pada rentang nilai dengan variabel terikat atau variabel dependen yaitu ZPRED serta residualnya SRESID. Adapun landasan analisis yang digunakan adalah:

- (1) Apabila terdapat bentuk tertentu seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur baik melebar, bergelombang, maupun menyempit maka dapat diidentifikasi bahwa telah terjadi heteroskedastisitas
- 2) Apabila titik-titik tidak menggambarkan pola yang jelas, dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat diidentifikasi bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa titik-titik berada diatas dan dibawah angka 0 sumbu Y secara acak dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan menurut Ghozali (2013) apabila tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain menggunakan grafik plot dapat dilihat pula menggunakan tabel statistik *coefficients*. Yaitu apabila signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Seperti tabel berikut:

Tabel 4.14

Tabel Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,480	1,451		,330	,742
	X1.Total	,113	,115	,153	,980	,331
	X2.Total	,079	,086	,154	,925	,359
	X3.Total	-,061	,092	-,109	-,664	,509
	X4.Total	-,126	,071	-,275	-1,774	,082

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data Primer yang Diolah, Juni 2023

4.3.3 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (X1), *Good Governance* (X2), Akuntabilitas (X3), dan Transparansi (X4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Hasil pengujian analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.14 dibawah ini:

Tabel 4.15
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,098	2,505		2,036	,047		
	SAP	,453	,198	,277	2,287	,026	,668	1,497
	GOOD GOVERNANCE	-,238	,148	-,207	-1,605	,114	,590	1,696
	AKUNTABILITAS	,498	,159	,397	3,133	,003	,611	1,637
	TRANSPARANSI	,339	,122	,333	2,771	,008	,679	1,473

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Sumber: Data Primer yang Diolah, Juni 2023

Berdasarkan tabel 4.15 menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,098 + 0,453X_1 - 0,238X_2 + 0,498X_3 + 0,339X_4$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta menunjukkan nilai sebesar 5,098 dan bernilai positif menjelaskan keadaan ketika variabel independen Standar Akuntansi Pemerintah (X1), *Good Governance* (X2), Akuntabilitas (X3) , Dan Transparansi (X4) maka besar nilai Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 5,098.
2. Nilai koefisien untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1) sebesar 0,453. Nilai tersebut menunjukkan nilai positif sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1) meningkat satu maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,453. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya standar akuntansi pemerintah maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.
3. Nilai koefisien untuk variabel *Good Governance* (X2) sebesar -0,238 Nilai tersebut menunjukkan nilai negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila variabel *Good Governance* meningkat satu maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah akan mengalami penurunan sebesar -0,238. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semakin tinggi pengelolaan *good governance* (X2) maka akan menurunkan tingkat Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya tata kelola pemerintahan yang buruk dapat menurunkan tingkat kualitas laporan keuangan daerah.

4. Nilai koefisien untuk variabel Akuntabilitas (X3) sebesar 0,498. Nilai tersebut menunjukkan nilai positif sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila variabel Akuntabilitas (X3) meningkat satu maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,498. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya Akuntabilitas maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.
5. Nilai koefisien regresi Transparansi (X4) sebesar 0,339. Nilai tersebut menunjukkan nilai positif sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila variabel Transparansi (X4) meningkat satu maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,339. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya Transparansi maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

4.3.4 Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2013) uji t ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara satu variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Uji statistis t dapat dilakukan dengan membedakan anatar skor t-tabel dan t-hitung. Jika nilai $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak dengan artian bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Sedangkan jika nilai $t < 0,05$ maka dipotesis

diterima atau dapat diartikan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.16

Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,098	2,505		2,036	,047
	SAP	,453	,198	,277	2,287	,026
	GOOD GOVERNANCE	-,238	,148	-,207	-1,605	,114
	AKUNTABILITAS	,498	,159	,397	3,133	,003
	TRANSPARANSI	,339	,122	,333	2,771	,008

Sumber: Data Primer yang Diolah, Juni 2023

Berdasarkan tabel 4.16 diatas hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1) adalah sebesar 0,026, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0,05 dan t_{hitung} (2,287) lebih besar dari t_{tabel} (2,004) hasil tersebut menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (X1) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), sehingga membuktikan bahwa H_1 diterima.
2. Nilai signifikansi variabel *Good Governance* (X2) adalah sebesar 0,114, dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar daripada 0,05 dan t_{hitung} (-1,605) lebih kecil dari t_{tabel} (2,004) hasil tersebut menunjukkan bahwa *Good Governance* (X2) secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), sehingga membuktikan bahwa H_2 ditolak.

3. Nilai signifikansi variabel Akuntabilitas (X3) adalah sebesar 0,003, dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar daripada 0,05 dan t_{hitung} (3,133) lebih besar dari t_{tabel} (2,004) hasil tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas (X3) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), sehingga membuktikan bahwa H_3 diterima.
4. Nilai signifikansi variabel Transparansi (X4) adalah sebesar 0,008, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0,05 dan t_{hitung} (2,771) lebih besar dari t_{tabel} (2,004) hasil tersebut menunjukkan bahwa Transparansi (X4) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), sehingga membuktikan bahwa H_4 diterima.

2. Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F ini digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil Uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.17 dibawah ini:

Tabel 4.17

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	118,439	4	29,610	11,776	,000 ^b
	Residual	138,294	55	2,514		
	Total	256,733	59			
a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN						
b. Predictors: (Constant), TRANSPARANSI, SAP, AKUNTABILITAS, GOOD GOVERNANCE						

Sumber: Data Primer yang Diolah, Juni 2023

Berdasarkan Uji F pada tabel diatas, di temukan nilai F_{hitung} sebesar 11,776 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas lebih kecil daripada 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan F_{hitung} (11,776) lebih besar dibandingkan F_{tabel} (2,773), maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kualitas Laporan Keuangan Daerah atau dapat dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance*, Akuntabilitas, dan Transparansi, secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sehingga membuktikan bahwa H_5 diterima.

4.4 Interpretasi

Pada uraian yang sudah dibahas diatas terdapat variabel terikat dan variabel bebas, variabel terikat pada penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan daerah (Y) dan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu standar akuntansi pemerintah (X1), *Good Governance* (X2), Akuntabilitas (X3), dan Transparansi (X4). Penelitian ini dilakukan kepada 60 responden yaitu pegawai BKAD Kabupaten Situbondo dengan sampel yang memenuhi kriteria tertentu.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat dihitung nilai masing-masing variabel sebagai berikut:

4.4.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (X1) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Hasil penelitian diatas juga membuktikan bahwa H_1 diterima, hal tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah sudah di laksanakan dalam membuat laporan keuangan daerah.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah memahami PP Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Penyusunan pedoman akuntansi sangat diperlukan karena mengingat adanya batas waktu bagi organisasi publik untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan keuangan semakin mendesak. Sehingga semakin menerapkan dengan memahami standar akuntansi pemerintah maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rukmi, 2013) yang menunjukkan bahwa hasil pengujian korelasi pearson terhadap variable implementasi standar akuntansi pemerintahan memiliki hubungan yang

sangat kuat/erat dengan kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian regresi secara simultan dengan uji F maupun parsial dengan uji t, memperlihatkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

4.4.2 Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa *Good Governance* (X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Hasil penelitian diatas juga membuktikan bahwa H_2 ditolak, hal tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan *Good Governance* tidak mempengaruhi dalam membuat laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azlim, dkk (2012) yang menunjukkan bahwa variabel penerapan *good governance* secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.

4.4.3 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa Akuntabilitas (X3) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Hasil penelitian diatas juga membuktikan bahwa

H₃ diterima, hal tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan Akuntabilitas sudah di laksanakan dengan baik dalam membuat laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Akuntabilitas merupakan tujuan penting dari reformasi sektor publik mengingat secara definitif kualitas pemerintahan yang baik ditentukan oleh hal tersebut ditambah dengan peran serta masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Akuntabilitas keuangan daerah akan memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kabupaten Situbondo kepada semua pihak yang berkepentingan sehingga hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya dapat dipenuhi.

4.4.4 Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa Transparansi (X₄) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Hasil penelitian diatas juga membuktikan bahwa H₄ diterima, hal tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan Transparansi sudah berpengaruh dengan baik dalam membuat laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan transparansi

laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mengenai informasi tentang pos-pos laporan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak publik. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agent mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakilwakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan, sehingga masyarakat/agent mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah daerah, (Rosalin, 2011).

Transparansi kebijakan publik memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Selain menyajikan laporan keuangan pemerintah juga dalam meningkatkan transparansi kebijakan publik atau sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik, pemerintah memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi laporan keuangan.

4.4.5 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance*, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (X1), *Good Governance* (X2), Akuntabilitas (X3), dan Transparansi (X4) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Hasil penelitian diatas juga membuktikan bahwa H_5 diterima.

Standar akuntansi pemerintah, sangat diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan daerah, karena dengan pembuatan laporan keuangan daerah yang memenuhi standar akuntansi pemerintah dan prinsip-prinsip yang ada maka akan menciptakan *good governance* yang diinginkan oleh masyarakat luas. Laporan keuangan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara transparansi guna menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2013) yang menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti tentang “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance*, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo)”. Survey dilakukan dengan menyebarkan kuisioner sebanyak 60 responden yang merupakan pegawai BKAD dengan sampel ataupun kriteria tertentu. Berdasarkan hasil uji dan pembahasan di bab 4, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Pemerintah (X1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), sehingga membuktikan bahwa H_1 diterima. Dapat dinyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah sudah diterapkan dan dipahami dalam pembuatan laporan keuangan daerah.
2. *Good Governance* (X2) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), sehingga membuktikan bahwa H_2 ditolak. Dapat dinyatakan bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh dalam pembuatan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Memang *good governance* sudah dilakukan dengan baik namun tata kelola pemerintahan yang baik tidak menjadi tolak ukur dalam pembuatan laporan keuangan daerah karena dengan adanya pencatatan laporan

keuangan yang sesuai dengan prinsip dan pedoman yang ada maka laporan keuangan tersebut sudah baik.

3. Akuntabilitas (X3) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), sehingga membuktikan bahwa H_3 diterima. Dapat dinyatakan bahwa penerapan Akuntabilitas sudah diterapkan dan dijalankan dengan baik dalam pembuatan laporan keuangan daerah.

4. Transparansi (X4) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), sehingga membuktikan bahwa H_4 diterima. Dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan daerah sudah dilakukan secara transparansi kepada masyarakat untuk pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.

5. Standar Akuntansi Pemerintah (X1), *Good Governance* (X2), Akuntabilitas (X3), dan Transparansi (X4) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Sehingga membuktikan bahwa H_5 diterima. Dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintah, good governance, akuntabilitas, dan transparansi sudah dilaksanakan dengan baik dalam pembuatan laporan keuangan daerah.

5.2 Implikasi

Dari hasil penelitian pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo ini dapat digunakan untuk menyimpulkan variabel-variabel yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah yaitu standar akuntansi pemerintah, *good governance*, akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan hasil yang diperoleh menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terdapat pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dan *good governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan kesimpulan yang sudah ditarik maka dapat dijelaskan implikasi sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan maupun wawasan terkait pengaruh standar akuntansi pemerintah, *good governance*, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan untuk pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dengan baik. Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah dapat ditinjau melalui beberapa faktor penentu yaitu tingkat penerapan standar akuntansi pemerintah, *good governance*, akuntabilitas, dan transparansi.

Meskipun dari empat variabel tersebut tidak semuanya berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, setidaknya terdapat tiga variabel yang berpengaruh signifikan yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas, dan transparansi. Sedangkan, untuk variabel *good*

governance tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terdapat adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk para pegawai BKAD Kabupaten Situbondo diharapkan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintah, *good governance*, akuntabilitas, dan transparansi dalam pembuatan laporan keuangan daerah yang baik, berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang ada serta memberikan informasi laporan keuangan untuk masyarakat secara transparan.
2. Untuk para akademisi mahasiswa, maupun peneliti agar terus mengkaji dan mengembangkan penelitian yang nantinya akan dilakukan di masa yang akan datang. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel sesuai kriteria yang dapat memahami laporan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W., & Rafid, R. Z. (2017). Pemoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 3(2).
- Azlim, D., & Bakar, U. A. (2012). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akutansi ISSN*, 2302, 164.
- Botutihe, T. H. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo. *Skripsi*, 1(241408102).
- Defitri, S. Y. (2016, October). Pengaruh pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. In *National Conference of Applied Sciense, Engineering, Business and Information technology, Politeknik Negeri Padang*.
- Ikyarti, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131-140.
- Inapty, M. A. F. B. A., & Martiningsih, R. S. P. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Di Pemprov NTB). *Akuntabilitas*, 9(1).

- Juwita, R. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, 12(2), 201-214.
- Karimah, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Latar Belakang Pendidikan, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Komang, A. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Singaraja: e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 22-32.
- Mardiasmo. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta
- Safridha, M. A. (2020). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus BPKAD Provinsi Sumatera Utara)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Stanbury, W. T. (2003). *Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality*. Fraser Institute.
- Van Zyl, A. J. (2007). A knowledge gap analysis on multi-scale predictive ability for agriculturally derived sediments under South African conditions. *Water science and technology*, 55(3), 107-114.

Widari, L., & Sutrisno, S. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen)*, 5(10), 117-126.

Yani, J. A. Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Ferrari, JR, Jhonson, JL, & McCown, WG (1995). *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research & Treatment*. New York: Plenum Press. Yudistira P, Chandra. *Diktat Kuliah Psikometri*. Fakultas Psikologi Universitas.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian

KUISISIONER PENELITIAN

I. Pengantar

Kepada : Yth. Bapak/Ibu Pegawai BKAD

Di tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi tugas akhir atau skripsi yang sedang saya lakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember, maka dengan segala kerendahan hati saya sangat menghargai tanggapan Bapak/Ibu terhadap pernyataan yang tersedia dalam kuisisioner ini mengenai **“Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Good Governance, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo)”**.

Saya berharap Bapak/Ibu bersedia untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuisisioner yang saya sertakan, dengan jujur dan terbuka sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. Informasi yang Bapak/Ibu berikan hanya digunakan untuk kepentingan akademis, saya menjamin kerahasiaan semua data yang tercantum dalam kuisisioner ini. Kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisisioner ini adalah bantuan yang begitu berharga bagi saya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Dwi Oktafia Ariyanti

II. Data Responden

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk melengkapi daftar isian yang tertera di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin : Pria / Wanita
- c. Usia :
- d. Jabatan :
- e. Masa Kerja : < 2 tahun
 3 – 5 tahun
 > 5 tahun

III. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda checklist (√) pada kolom jawaban yang menurut Bapak/Ibu sesuai atau paling tepat sebagai berikut :

No	Pernyataan	Bobot Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Isilah pernyataan sebagai berikut :

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
SAP (X1)						
1.	Penyusunan laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan					
2.	Pada instansi tempat saya bekerja, telah menggunakan basis akrual untuk mengakui aset.					
3.	Pada instansi tempat saya bekerja, telah menggunakan basis kas untuk mengakui pendapatan					
Good Governance (X2)						
1.	Menurut saya instansi tempat saya bekerja sudah menyelenggarakan <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik) secara transparansi					
2.	Pertanggungjawaban instansi tempat saya bekerja dilaksanakan secara periodik melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)					
3.	Menurut saya untuk menciptakan <i>good governance</i> , pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan secara efektif					

4.	Menurut saya pemeliharaan fasilitas publik sudah dikelola secara efektif dan efisien					
Akuntabilitas (X3)						
1.	Pengawas, pengurus, dan karyawan telah mengetahui visi, misi, dan tujuan operasional lembaga					
2.	Pelaksanaan program-program dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku					
3.	Pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat					
Transparansi (X4)						
1.	Masyarakat mudah dalam mengakses dan mendapatkan informasi keuangan di pemerintah daerah					
2.	Laporan keuangan dan laporan hasil audit BPK dipublikasikan di website resmi pemerintah daerah					
3.	Pengawas, pengurus, dan karyawan terbuka dalam proses pengambilan keputusan					

Kualitas laporan keuangan (Y)						
1.	Laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja, telah menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan di masalalu dan mampu memprediksi masa yang akan datang.					
2.	Laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja, telah menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan					
3.	Informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja telah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.					
4.	Laporan keuangan pada isntansi tempat saya bekerja telah disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami dengan jelas					

Lampiran 2. Data Responden dan Tabulasi Data

No	Nama	JK	Usia	Jabatan	Masa Kerja
1	Titah Citra Negara,SE	Wanita	36	Kanbid Akuntansi Wil.1	> 5 tahun
2	Abdul hadi H.R	Pria	32	Staf Bidang Akuntansi	> 5 tahun
3	Ryadh Mahendra P.M	Pria	31	Staf Bidang Akuntansi	> 5 tahun
4	M. Rizal	Pria	30	Staf Bidang Akuntansi	> 5 tahun
5	Sunjoto	Pria	55	Staf Bidang Akuntansi	> 5 tahun
6	Riska Lestari	Wanita	30	Staf Bidang Akuntansi	> 5 tahun
7	Yudik Wergiyanto	Pria	30	Penyusun Lap. Keuangan	> 5 tahun
8	Hafiet Rusdi, S.Sos	Pria	53	Staf Bidang Akuntansi	> 5 tahun
9	Fatikhatur Rosyidah	Wanita	30	Staf Bidang Akuntansi	3-5 tahun
10	Yoni Fitra Yulianto	Pria	40	Kabid Akuntansi	> 5 tahun
11	Nd. Zaini Sy	Pria	39	Staf Bidang Akuntansi	> 5 tahun
12	Rubi Tridarta S	Pria	34	Staf Bidang Akuntansi	> 5 tahun
13	Fahmi Firdaus	Pria	27	Staf Bidang Akuntansi	3-5 tahun
14	Christy Nadiva P	Wanita	25	Staf Bidang Akuntansi	< 2 tahun
15	Agus Dwi Susanto	Pria	37	Staf Bidang Aset	3-5 tahun
16	Nur Muhammadiyah	Pria	51	Staf Bidang Aset	> 5 tahun
17	Hidayat Sumantri	Pria	53	Staf Bidang Aset	> 5 tahun
18	Erwan	Pria	44	Kanbid Penatausahaan	> 5 tahun
19	R. Maula	Wanita	29	Staf Bidang Aset	3-5 tahun
20	Endra F	Pria	48	Kasubbid Penatausahaan	> 5 tahun
21	Imas	Pria	42	Kabid Aset	< 2 tahun
22	Fajar H	Pria	32	Staf Bidang Aset	> 5 tahun
23	Arif	Pria	27	Staf Bidang Aset	3-5 tahun
24	Rohmawati	Wanita	34	Staf Bidang Aset	3-5 tahun
25	Erika	Pria	37	Staf Bidang Aset	> 5 tahun
26	Evi Pindariyatin	Wanita	49	Staf Bidang Aset	> 5 tahun
27	Salaman	Pria	65	Staf Bidang Aset	> 5 tahun
28	Supriyono	Pria	57	Staf Bidang Aset	> 5 tahun
29	Hadi Supeno, S.H	Pria	57	Kasubbid analisa dan keb.	> 5 tahun
30	M. Iqbal G	Pria	27	Staf Bidang Aset	3-5 tahun
31	Rahadian F R	Pria	30	Staf Bidang Aset	3-5 tahun
32	Furqon R A	Pria	25	Staf Bidang Aset	< 2 tahun
33	Guntur T B	Pria	25	Staf Bidang Aset	< 2 tahun
34	Ary Faizal Q	Pria	26	Staf Bidang Aset	< 2 tahun
35	Riska Amalia	Wanita	38	Staf Bidang Aset	> 5 tahun
36	Alifah	Wanita	29	Staf Bidang Aset	> 5 tahun
37	Sendi Dwi Prakoso	Pria	30	Staf Bidang Aset	3-5 tahun
38	Meyes	Wanita	29	Staf Bidang Aset	< 2 tahun
39	Yoga Swara A, S.H	Pria	36	Staf Bidang Aset	> 5 tahun
40	Sutrisno	Pria	45	Staf Bidang Aset	> 5 tahun
41	Dina Nafisah A, S.Ak	Wanita	23	Staf Perbendaharaan	< 2 tahun
42	Chusla Indah A W, S.E.,MM	Wanita	38	Analisis Keuangan PusDa	> 5 tahun
43	Bardak	Pria	48	Staf Perbendaharaan	> 5 tahun
44	Mahfudhan Hamimi	Pria	28	Staf Perbendaharaan	> 5 tahun
45	Pratikta Nur H, S.E	Wanita	27	Staf Perbendaharaan	3-5 tahun
46	Tucik Rucindra	Wanita	40	Analisis Perbendaharaan	> 5 tahun
47	Faradita Fairus Y H	Wanita	24	Staf Pengelola Data	3-5 tahun
48	Riyono A S	Pria	42	Staf Perbendaharaan	> 5 tahun
49	Muhammad Herman P P	Pria	27	Staf Perbendaharaan	> 5 tahun
50	Aditya Pambudi P	Pria	33	Staf Perbendaharaan	3-5 tahun
51	Riki Dwi H	Pria	31	Staf Perbendaharaan	> 5 tahun
52	Indah Meilina Istifarin	Wanita	35	Staf Perbendaharaan	> 5 tahun
53	Prita Romadani	Wanita	33	Staf Perbendaharaan	> 5 tahun
54	Afriyanti	Wanita	30	Staf Perbendaharaan	> 5 tahun
55	Adjie Suryanendra	Pria	26	Staf Perbendaharaan	3-5 tahun
56	Didik Budiantoro	Pria	56	Kasubbid Penatausahaan	> 5 tahun
57	Hermanto	Pria	34	Staf Perbendaharaan	3-5 tahun
58	Ovi	Pria	26	Staf Perbendaharaan	< 2 tahun
59	Desti H. S.E	Wanita	46	Staf Perbendaharaan	> 5 tahun
60	Maulana Rasyaid	Pria	28	Staf Perbendaharaan	3-5 tahun

Lampiran 3. Hasil Uji Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

		Correlations			
		X1.1	X1.2	X1.3	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,571**	,526**	,843**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	60	60	60	60
X1.2	Pearson Correlation	,571**	1	,333**	,743**
	Sig. (2-tailed)	,000		,009	,000
	N	60	60	60	60
X1.3	Pearson Correlation	,526**	,333**	1	,824**
	Sig. (2-tailed)	,000	,009		,000
	N	60	60	60	60
Total_X1	Pearson Correlation	,843**	,743**	,824**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					

Lampiran 4. Hasil Uji Validitas Variabel Good Governance (X2)

		Correlations				
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.TOTAL
X2.1	Pearson Correlation	1	,459**	,090	,604**	,779**
	Sig. (2-tailed)		,000	,494	,000	,000
	N	60	60	60	60	60
X2.2	Pearson Correlation	,459**	1	,359**	,440**	,743**
	Sig. (2-tailed)	,000		,005	,000	,000
	N	60	60	60	60	60
X2.3	Pearson Correlation	,090	,359**	1	,293*	,548**
	Sig. (2-tailed)	,494	,005		,023	,000
	N	60	60	60	60	60
X2.4	Pearson Correlation	,604**	,440**	,293*	1	,833**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,023		,000
	N	60	60	60	60	60
X2.TOTAL	Pearson Correlation	,779**	,743**	,548**	,833**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60	60
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).						

Lampiran 5. Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X3)

		Correlations			
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.TOTAL
X3.1	Pearson Correlation	1	,462**	,413**	,792**
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,000
	N	60	60	60	60
X3.2	Pearson Correlation	,462**	1	,608**	,817**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	60	60	60	60
X3.3	Pearson Correlation	,413**	,608**	1	,830**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,000
	N	60	60	60	60
X3.TOTAL	Pearson Correlation	,792**	,817**	,830**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 6. Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi (X4)

		Correlations			
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.TOTAL
X4.1	Pearson Correlation	1	,667**	,423**	,850**
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,000
	N	60	60	60	60
X4.2	Pearson Correlation	,667**	1	,424**	,877**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,000
	N	60	60	60	60
X4.3	Pearson Correlation	,423**	,424**	1	,725**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001		,000
	N	60	60	60	60
X4.TOTAL	Pearson Correlation	,850**	,877**	,725**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 7. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

		Correlations				
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.TOTAL
Y.1	Pearson Correlation	1	,721**	,447**	,450**	,762**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60
Y.2	Pearson Correlation	,721**	1	,645**	,613**	,884**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60
Y.3	Pearson Correlation	,447**	,645**	1	,772**	,868**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	60	60	60	60	60
Y.4	Pearson Correlation	,450**	,613**	,772**	1	,845**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	60	60	60	60	60
Y.TOTAL	Pearson Correlation	,762**	,884**	,868**	,845**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 8. Hasil Uji Reabilitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
,710	3

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	9,2500	,835	,662	,479
X1.2	9,2333	,962	,494	,666
X1.3	9,3833	,681	,486	,727

Lampiran 9. Hasil Uji Reabilitas Variabel Good Governance (X2)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
,707	4

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	13,4167	1,806	,531	,622
X2.2	13,3167	2,152	,561	,614
X2.3	13,4167	2,518	,289	,749
X2.4	13,6000	1,668	,629	,549

Lampiran 10. Hasil Uji Reabilitas Variabel Akuntabilitas (X3)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
,732	3

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	8,3333	1,345	,484	,744
X3.2	8,2333	1,538	,634	,584
X3.3	8,4000	1,295	,579	,615

Lampiran 11. Hasil Uji Reabilitas Variabel Transparansi (X4)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
,753	3

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	8,0333	2,067	,661	,584
X4.2	8,0500	1,675	,651	,593
X4.3	7,8167	2,525	,464	,792

Lampiran 12. Hasil Uji Reabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah(Y)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,860	4

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	13,0500	2,896	,607	,860
Y.2	13,0833	2,417	,779	,790
Y.3	13,1000	2,295	,730	,816
Y.4	13,0667	2,640	,727	,815

Lampiran 13. Hasil Uji Normalitas

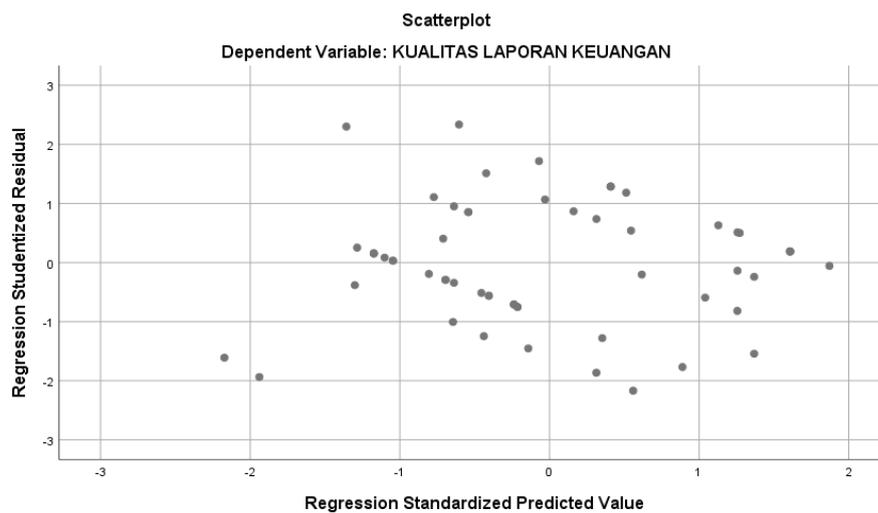
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,53100075
Most Extreme Differences	Absolute	,075
	Positive	,075
	Negative	-,048
Test Statistic		,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Lampiran 14. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,098	2,505		2,036	,047		
	SAP	,453	,198	,277	2,287	,026	,668	1,497
	GOOD GOVERNANCE	-,238	,148	-,207	-1,605	,114	,590	1,696
	AKUNTABILITAS	,498	,159	,397	3,133	,003	,611	1,637
	TRANSPARANSI	,339	,122	,333	2,771	,008	,679	1,473

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Lampiran 15. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,098	2,505		2,036	,047		
	SAP	,453	,198	,277	2,287	,026	,668	1,497
	GOOD GOVERNANCE	-,238	,148	-,207	-1,605	,114	,590	1,696
	AKUNTABILITAS	,498	,159	,397	3,133	,003	,611	1,637
	TRANSPARANSI	,339	,122	,333	2,771	,008	,679	1,473

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Lampiran 16. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,098	2,505		2,036	,047		
	SAP	,453	,198	,277	2,287	,026	,668	1,497
	GOOD GOVERNANCE	-,238	,148	-,207	-1,605	,114	,590	1,696
	AKUNTABILITAS	,498	,159	,397	3,133	,003	,611	1,637
	TRANSPARANSI	,339	,122	,333	2,771	,008	,679	1,473

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Lampiran 17. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,098	2,505		2,036	,047
	SAP	,453	,198	,277	2,287	,026
	GOOD GOVERNANCE	-,238	,148	-,207	-1,605	,114
	AKUNTABILITAS	,498	,159	,397	3,133	,003
	TRANSPARANSI	,339	,122	,333	2,771	,008

Lampiran 18. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	118,439	4	29,610	11,776	,000 ^b
	Residual	138,294	55	2,514		
	Total	256,733	59			

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
b. Predictors: (Constant), TRANSPARANSI, SAP, AKUNTABILITAS, GOOD GOVERNANCE

Lampiran 19. R_{tabel}

Tabel r untuk df = 51 - 100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Lampiran 20. T_{tabel}

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

Pr df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilitas yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Lampiran 21. F_{tabel}

Tabel Uji F

$\alpha = 0,05$ $df_2=(n-k-1)$	$df_1=(k-1)$							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	161.448	199.500	215.707	224.583	230.162	233.986	236.768	238.883
2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296	19.330	19.353	19.371
3	10.128	9.552	9.277	9.117	9.013	8.941	8.887	8.845
4	7.709	6.944	6.591	6.388	6.256	6.163	6.094	6.041
5	6.608	5.786	5.409	5.192	5.050	4.950	4.876	4.818
6	5.987	5.143	4.757	4.534	4.387	4.284	4.207	4.147
7	5.591	4.737	4.347	4.120	3.972	3.866	3.787	3.726
8	5.318	4.459	4.066	3.838	3.687	3.581	3.500	3.438
9	5.117	4.256	3.863	3.633	3.482	3.374	3.293	3.230
10	4.965	4.103	3.708	3.478	3.326	3.217	3.135	3.072
11	4.844	3.982	3.587	3.357	3.204	3.095	3.012	2.948
12	4.747	3.885	3.490	3.259	3.106	2.996	2.913	2.849
13	4.667	3.806	3.411	3.179	3.025	2.915	2.832	2.767
14	4.600	3.739	3.344	3.112	2.958	2.848	2.764	2.699
15	4.543	3.682	3.287	3.056	2.901	2.790	2.707	2.641
16	4.494	3.634	3.239	3.007	2.852	2.741	2.657	2.591
17	4.451	3.592	3.197	2.965	2.810	2.699	2.614	2.548
18	4.414	3.555	3.160	2.928	2.773	2.661	2.577	2.510
19	4.381	3.522	3.127	2.895	2.740	2.628	2.544	2.477
20	4.351	3.493	3.098	2.866	2.711	2.599	2.514	2.447
21	4.325	3.467	3.072	2.840	2.685	2.573	2.488	2.420
22	4.301	3.443	3.049	2.817	2.661	2.549	2.464	2.397
23	4.279	3.422	3.028	2.796	2.640	2.528	2.442	2.375
24	4.260	3.403	3.009	2.776	2.621	2.508	2.423	2.355
25	4.242	3.385	2.991	2.759	2.603	2.490	2.405	2.337
26	4.225	3.369	2.975	2.743	2.587	2.474	2.388	2.321
27	4.210	3.354	2.960	2.728	2.572	2.459	2.373	2.305
28	4.196	3.340	2.947	2.714	2.558	2.445	2.359	2.291
29	4.183	3.328	2.934	2.701	2.545	2.432	2.346	2.278
30	4.171	3.316	2.922	2.690	2.534	2.421	2.334	2.266
31	4.160	3.305	2.911	2.679	2.523	2.409	2.323	2.255
32	4.149	3.295	2.901	2.668	2.512	2.399	2.313	2.244
33	4.139	3.285	2.892	2.659	2.503	2.389	2.303	2.235
34	4.130	3.276	2.883	2.650	2.494	2.380	2.294	2.225
35	4.121	3.267	2.874	2.641	2.485	2.372	2.285	2.217
36	4.113	3.259	2.866	2.634	2.477	2.364	2.277	2.209
37	4.105	3.252	2.859	2.626	2.470	2.356	2.270	2.201
38	4.098	3.245	2.852	2.619	2.463	2.349	2.262	2.194
39	4.091	3.238	2.845	2.612	2.456	2.342	2.255	2.187
40	4.085	3.232	2.839	2.606	2.449	2.336	2.249	2.180
41	4.079	3.226	2.833	2.600	2.443	2.330	2.243	2.174
42	4.073	3.220	2.827	2.594	2.438	2.324	2.237	2.168
43	4.067	3.214	2.822	2.589	2.432	2.318	2.232	2.163
44	4.062	3.209	2.816	2.584	2.427	2.313	2.226	2.157
45	4.057	3.204	2.812	2.579	2.422	2.308	2.221	2.152
46	4.052	3.200	2.807	2.574	2.417	2.304	2.216	2.147
47	4.047	3.195	2.802	2.570	2.413	2.299	2.212	2.143
48	4.043	3.191	2.798	2.565	2.409	2.295	2.207	2.138
49	4.038	3.187	2.794	2.561	2.404	2.290	2.203	2.134
50	4.034	3.183	2.790	2.557	2.400	2.286	2.199	2.130
51	4.030	3.179	2.786	2.553	2.397	2.283	2.195	2.126

52	4.027	3.175	2.783	2.550	2.393	2.279	2.192	2.122
53	4.023	3.172	2.779	2.546	2.389	2.275	2.188	2.119
54	4.020	3.168	2.776	2.543	2.386	2.272	2.185	2.115
55	4.016	3.165	2.773	2.540	2.383	2.269	2.181	2.112
56	4.013	3.162	2.769	2.537	2.380	2.266	2.178	2.109
57	4.010	3.159	2.766	2.534	2.377	2.263	2.175	2.106
58	4.007	3.156	2.764	2.531	2.374	2.260	2.172	2.103
59	4.004	3.153	2.761	2.528	2.371	2.257	2.169	2.100
60	4.001	3.150	2.758	2.525	2.368	2.254	2.167	2.097
61	3.998	3.148	2.755	2.523	2.366	2.251	2.164	2.094
62	3.996	3.145	2.753	2.520	2.363	2.249	2.161	2.092
63	3.993	3.143	2.751	2.518	2.361	2.246	2.159	2.089
64	3.991	3.140	2.748	2.515	2.358	2.244	2.156	2.087
65	3.989	3.138	2.746	2.513	2.356	2.242	2.154	2.084
66	3.986	3.136	2.744	2.511	2.354	2.239	2.152	2.082
67	3.984	3.134	2.742	2.509	2.352	2.237	2.150	2.080
68	3.982	3.132	2.740	2.507	2.350	2.235	2.148	2.078
69	3.980	3.130	2.737	2.505	2.348	2.233	2.145	2.076
70	3.978	3.128	2.736	2.503	2.346	2.231	2.143	2.074
71	3.976	3.126	2.734	2.501	2.344	2.229	2.142	2.072
72	3.974	3.124	2.732	2.499	2.342	2.227	2.140	2.070
73	3.972	3.122	2.730	2.497	2.340	2.226	2.138	2.068
74	3.970	3.120	2.728	2.495	2.338	2.224	2.136	2.066
75	3.968	3.119	2.727	2.494	2.337	2.222	2.134	2.064
76	3.967	3.117	2.725	2.492	2.335	2.220	2.133	2.063
77	3.965	3.115	2.723	2.490	2.333	2.219	2.131	2.061
78	3.963	3.114	2.722	2.489	2.332	2.217	2.129	2.059
79	3.962	3.112	2.720	2.487	2.330	2.216	2.128	2.058
80	3.960	3.111	2.719	2.486	2.329	2.214	2.126	2.056
81	3.959	3.109	2.717	2.484	2.327	2.213	2.125	2.055
82	3.957	3.108	2.716	2.483	2.326	2.211	2.123	2.053
83	3.956	3.107	2.715	2.482	2.324	2.210	2.122	2.052
84	3.955	3.105	2.713	2.480	2.323	2.209	2.121	2.051
85	3.953	3.104	2.712	2.479	2.322	2.207	2.119	2.049
86	3.952	3.103	2.711	2.478	2.321	2.206	2.118	2.048
87	3.951	3.101	2.709	2.476	2.319	2.205	2.117	2.047
88	3.949	3.100	2.708	2.475	2.318	2.203	2.115	2.045
89	3.948	3.099	2.707	2.474	2.317	2.202	2.114	2.044
90	3.947	3.098	2.706	2.473	2.316	2.201	2.113	2.043
91	3.946	3.097	2.705	2.472	2.315	2.200	2.112	2.042
92	3.945	3.095	2.704	2.471	2.313	2.199	2.111	2.041
93	3.943	3.094	2.703	2.470	2.312	2.198	2.110	2.040
94	3.942	3.093	2.701	2.469	2.311	2.197	2.109	2.038
95	3.941	3.092	2.700	2.467	2.310	2.196	2.108	2.037
96	3.940	3.091	2.699	2.466	2.309	2.195	2.106	2.036
97	3.939	3.090	2.698	2.465	2.308	2.194	2.105	2.035
98	3.938	3.089	2.697	2.465	2.307	2.193	2.104	2.034
99	3.937	3.088	2.696	2.464	2.306	2.192	2.103	2.033
100	3.936	3.087	2.696	2.463	2.305	2.191	2.103	2.032

Lampiran 22. Dokumentasi

